

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23  
ATAS ROYALTI PENULIS DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
ATAS BUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS-ASAS  
PEMUNGUTAN PAJAK**

Disusun Oleh:  
**Prasna Hanifa**  
NIM. 145020307111028

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Derajat Sarjana Ekonomi*



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2018**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23  
ATAS ROYALTY PENULIS DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
ATAS BUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS-ASAS  
PEMUNGUTAN PAJAK**

Yang disusun oleh :

Nama : Prasna Hanifa  
NIM : 145020307111028  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang kajian : Akuntansi Pajak

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 2 Juli 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak.  
NIP. 19740910 200212 1 001



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

***“Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Royalti Penulis dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Buku Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak”***

Yang disusun oleh:

Nama : Prasna Hanifa  
NIM : 145020307111028  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 Juli 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

1. Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak.

19740910 200212 1 001

(Dosen Pembimbing)

2. Tuban Drijah Herawati, SE., MM., Ak., CA.

19681007 199203 2 001

(Dosen Penguji I)

3. Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA.

201312 881214 2 001

(Dosen Penguji II)

Malang, 18 Mei 2018

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

NIP. 19590902 198601 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasna Hanifa

NIM : 145020307111028

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23  
ATAS ROYALTI PENULIS DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
ATAS BUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS-ASAS  
PEMUNGUTAN PAJAK**

adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 2 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Prasna Hanifa

NIM. 145020307111028

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Prasna Hanifa  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Malang/20 Agustus 1996  
**Agama** : Islam  
**Status** : Belum Menikah  
**Alamat Rumah** : Jl. Bayam II No. 42 Malang  
**Alamat Email** : prasna.hanifa@gmail.com

### Pendidikan formal :

**Sekolah Dasar** (2002-2008) : SD Laboratorium UM Malang  
**SMP** (2008-2011) : MTs Negeri 1 Malang  
**SMA** (2011-2014) : SMA Negeri 3 Malang

**Perguruan Tinggi** (2014-2018) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

### Pendidikan Non Formal :

- Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu di Universitas Brawijaya (2017)
- LIA preparation course of the TOEFL (2017)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: ***“Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Royalti Penulis dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Buku Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak”***. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Sebagai persembahan akhir studi, selama melakukan penelitian serta penyusunan skripsi ini, penulis tidak lupa dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas Ridha-Nya yang menjadikan penulis dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
2. Seluruh Keluarga, terutama Ayahanda Purwanto dan Ibunda Indriati beserta adik-adikku Irfan dan Nabila yang tidak henti-hentinya selalu memberikan doa, motivasi, perhatian serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang selalu mendukung, memberikan motivasi, serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Tuban Drijah Herawati, SE., Ak., MM. selaku dosen penguji yang telah banyak memberi masukan dan arahan dalam proses penyempurnaan dalam skripsi ini.
5. Ibu Ayu Fury Puspita, SE., M.S.A. Ak selaku dosen penguji yang telah banyak memberi masukan dan arahan dalam proses penyempurnaan dalam skripsi ini.
6. Bapak Nurkolis, S.E., M.Buss (Acc)., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

7. Ibu Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.seluaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
8. Seluruh jajaran staff jurusan akuntansi atas bantuan yang diberikan.
9. Sahabat-sahabatku Rani, Renny, Oci, Thania, Rana, Dila, Hani, Fithri, Beyin, dan Devinta yang telah menjadi *support system* dan selalu berbagi pengalaman, cerita, masukan, pengetahuan, serta memberikan rasa kekeluargaan yang kuat selama masa kuliah.
10. Amel dan Dika yang saling memberikan support, dukungan dan bantuan serta sama-sama mempersiapkan detik-detik terakhir sebelum sidang bersama hingga selesainya penyusunan skripsi ini bersama.
11. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2014, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah bersama-sama melakukan proses pembelajaran dalam perkuliahan selama 4 tahun ini.
12. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun dukungan dan semangatnya selalu saya rasakan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Malang, Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Kajian Literatur.....	8
2.2. Tinjauan Teori .....	10
2.2.1. Pengertian Pajak.....	10
2.2.2. Fungsi Pajak.....	11
2.2.3. Jenis Pajak.....	11
2.2.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	13
2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.2.6. Tarif Pajak.....	18
2.2.7. Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan .....	19
2.2.8. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	21
2.2.9. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	27
2.2.10. Pajak pada Buku .....	30
BAB III .....	34
3.1. Jenis Penelitian .....	34
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.3. Teknik Analisis Data .....	39



3.3.1. Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>44</b>
4.1. Gambaran Umum Proses Penerbitan Buku .....	44
4.1.1. Tarif dan Perhitungan Pajak.....	47
4.2. Kewajiban Pemungutan Pajak Serta Peraturan Terkait.....	50
4.2.1. Kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Buku dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Royalti Penulis .....	50
4.2.2. Peraturan-Peraturan Terkait Pajak atas Buku dan Pajak atas Royalti Penulis.....	52
4.3. Fasilitas PPN Dibebaskan atau PPN Tidak Dipungut.....	60
4.3.1. Fasilitas PPN Dibebaskan untuk Buku .....	62
4.3.2. Ilustrasi Penerapan PPN atas Buku .....	63
4.4. Analisis Pemungutan PPN atas Buku dan PPh Pasal 23 atas Royalti Ditinjau dari Asas Pemungutan Pajak .....	64
4.4.1. Asas Equity .....	64
4.4.2. Asas Revenue Productivity .....	71
4.4.3. Asas Ease of Administration.....	74
4.4.4. Asas <i>Neutrality</i> .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	87
5.3. Saran untuk Penelitian Berikutnya .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Tarif Pajak PPN dan Pajak Royalti di 13 Negara Asia.....	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 4.3.2. Ilustrasi Penerapan PPN atas Buku.....	63
Tabel 4.4.2. Penerimaan Negara Tahun 2017.....	72



## DAFTAR GAMBAR

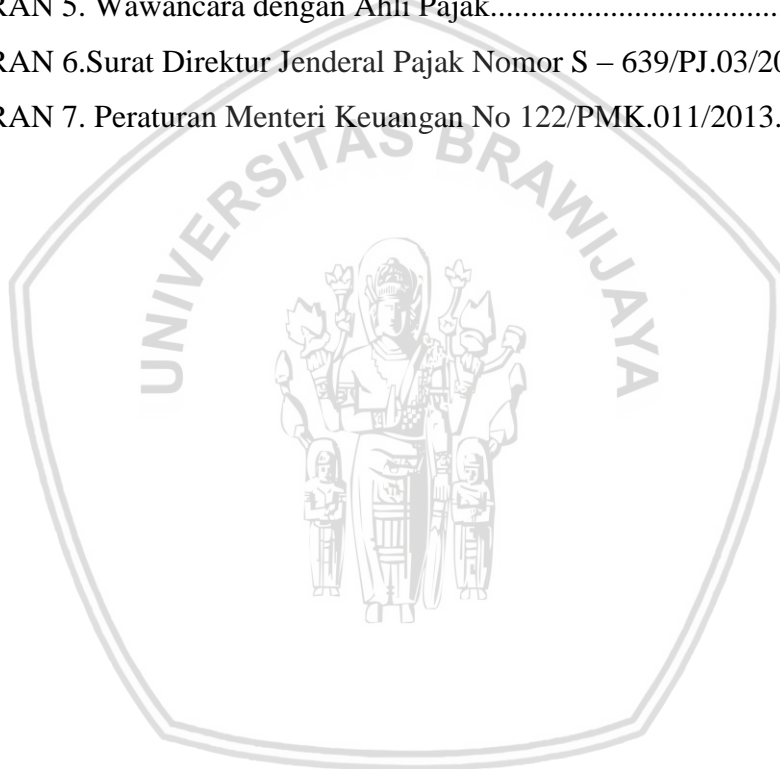
Gambar 3.3. Analisis Data Model Interaktif .....	40
Gambar 4.1. Alur Penerbitan Buku .....	47
Gambar 4.2. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017 .....	51
Gambar 4.3. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2017 .....	51





**DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1. Wawancara dengan Penulis Buku 1.....	91
LAMPIRAN 2. Wawancara dengan Penulis Buku 2.....	98
LAMPIRAN 3. Wawancara dengan Konsumen Buku 1.....	101
LAMPIRAN 4. Wawancara dengan Konsumen Buku 2.....	103
LAMPIRAN 5. Wawancara dengan Ahli Pajak.....	106
LAMPIRAN 6. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S – 639/PJ.03/2017.....	115
LAMPIRAN 7. Peraturan Menteri Keuangan No 122/PMK.011/2013.....	118



**ABSTRAK****ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23  
ATAS ROYALTI PENULIS DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
ATAS BUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS-ASAS  
PEMUNGUTAN PAJAK**

Oleh:  
**Prasna Hanifa**

Dosen Pembimbing:  
**Dr. Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-639/PJ.03/2017 dan pemungutan PPN atas buku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2013. Analisis ditinjau melalui empat asas pemungutan pajak, yaitu *equity*, *revenue productivity*, *ease of administration*, dan *neutrality*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis buku dan konsumen buku selaku Wajib Pajak merasa keberatan dengan pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN. Pemungutan pajak belum memenuhi asas *equity*, *neutrality*, dan beberapa unsur dalam asas *ease of administration*. Pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN sudah cukup memenuhi asas *revenue productivity* dan salah satu unsur dalam asas *ease of administration* yaitu asas *certainty*, karena pemerintah sudah jelas dalam memberikan informasi mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif yang dikenakan, dan prosedur pengenaan pajak.

**Kata kunci:** *Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, asas pemungutan pajak*

**ABSTRACT****THE INCOME TAX COLLECTION OF ARTICLE 23 ON AUTHOR ROYALTY AND VALUE-ADDED TAX (VAT) FOR BOOKS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF TAX COLLECTION PRINCIPLES**

By:

**Prasna Hanifa**

Supervisor:

**Dr. Aulia Fuad Rahman, S.E., M.Si., Ak.**

This study aims at analyzing the income tax collection as regulated in Article 23 on author royalty (with regard to the Letter of the Directorate General of Taxation No. S-639/PJ.03/2017) and VAT collection for books (on the basis of the regulation of the Minister of Finance No. 122 Year 2013). The analysis focuses on four principles of tax collection: equity, revenue productivity, ease of administration, dan neutrality. This qualitative descriptive research applies phenomenology approach. The results of the study show that both book authors and its consumers as Taxpayers raise their objections on the income tax collection regulated in Article 23 and upon the VAT imposed. The tax collection does not meet the principles of equity, neutrality, and most elements of ease of administration. However, the tax collection and the VAT implementation have fulfilled the revenue productivity principle and one element of ease of administration, namely certainty, as indicated by the government's clear information on the tax subjects, tax objects, tax base, tariffs imposed, and tax procedures.

**Keywords:** Income Tax, Value-Added Tax, Tax Collection Principles



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Industri buku di Indonesia sedang mengalami kelesuan. Hal ini bisa dilihat dari angka penjualan buku yang terus menurun. Menurut Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), data penjualan buku di toko buku pada tahun 2013 mencapai 69.766 juta eksemplar, namun pada tahun 2014 penjualan menurun menjadi 62.656 juta eksemplar (ikapi.org, 2018). Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penjualan buku yang semakin menurun, jumlah penerbitan buku justru mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional dan toko buku di Indonesia, pada tahun 2013 terdapat 63.252 judul baru dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 68.531 judul baru (ikapi.org, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan minat baca masyarakat yang masih rendah. Menurut survei World's Most Literate Nation's Ranked 2016, minat baca di Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara. Hal ini tentu saja memprihatinkan, sebab rendahnya minat baca dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, kurangnya membaca menjadikan tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang tertinggal.

Zubaidah (2009) menyatakan bahwa salah satu kendala peningkatan minat baca adalah mahalny harga buku yang beredar di pasaran. Hal ini diakibatkan

oleh mahalny biaya produksi dan beratnya beban pajak yang harus ditanggung oleh penerbit dan penulis. Di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013, buku dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% kepada konsumen kecuali untuk kategori buku pelajaran umum, kitab suci, dan pelajaran agama, serta semua buku yang mendapat pengesahan dari institusi terkait. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 penulis juga dipungut pajak atas royalti sebesar 15%. Oleh sebab itu harga jual buku menjadi mahal dan berdampak pada minimnya minat baca di Indonesia, sehingga penjualan buku juga berkurang.

Berdasarkan data dari riset *International Publisher Association* (Juli 2015), Indonesia termasuk negara yang mengenakan tarif PPN (*Value Add Tax* (VAT)/*Goods and Service Tax* (GST)) untuk buku dan pajak royalti yang tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia. China adalah negara dengan tarif PPN tertinggi untuk buku cetak yaitu 13%, kemudian disusul dengan Indonesia dan Mongolia yang mengenakan tarif PPN 10% untuk semua jenis buku. Adapun negara yang mengenakan tarif PPN-nya 0% untuk buku cetak adalah Hong Kong, India, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Namun, untuk PPN buku elektronik, Malaysia mengenakan tarif 6%, Filipina 12% dan Thailand 7%. Sedangkan untuk negara Hong Kong, India, dan Korea Selatan tetap memberlakukan PPN sebesar 0% untuk buku elektronik.

Indonesia juga termasuk negara yang mengenakan pajak royalti tinggi dibandingkan negara-negara lainnya, yaitu sebesar 15%. Meskipun masih dibawah Filipina yang mengenakan 20% dan setara dengan Vietnam yang

mengenaikan tarif 15% untuk pajak royalti, namun ada juga negara-negara yang mengenaikan pajak royalti 0%, yaitu negara Hong Kong, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan.

**Tabel 1.1.**

**Tarif Pajak PPN dan Pajak Royalti di 13 Negara Asia**

No	Country	Standard VAT/GST rate*	VAT/GST rate*, printed books	VAT/GST rate*, e-books	Royalties **
1	China	17%	13%	No info	10% .
2	Hong Kong	0%	0%	0%	0%
3	India	5-15%	0%	0%	10%
4	Indonesia	10%	10%	10%	15%
5	Japan	8%	8%	8%	0%
6	Malaysia	6%	0%	6%	0%
7	Mongolia	10%	10%	10%	10%
8	Philippines	12%	0%	12%	20%
9	Singapore	7%	7%	7%	10% .
10	South Korea	10%	0%	0%	0%
11	Taiwan	5%	5%	5%	10%
12	Thailand	7%	0%	7%	3%
13	Vietnam	10%	5%	0%	15% .

Sumber: \*International Publisher Association 2015

\*\*PWC 2017

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tarif pajak sering dikeluhkan oleh para penulis buku dan konsumen buku. Seperti protes yang dilakukan oleh seorang penulis buku yang mengumumkan sudah memutuskan kontrak dengan dua penerbit besar Indonesia. Protes ini dilakukan dengan alasan penulis buku merasa pemerintah selama ini tidak adil terhadap profesi penulis buku karena mengenaikan pajak dua kali lebih tinggi dari pada profesi pekerjaan bebas lainnya. Sedangkan penulis buku dikenakan PPh Pasal 23 atas royalti sebesar 15% dari jumlah bruto atau royalti yang didapatkannya dan langsung dipotong oleh penerbit. Hal ini dirasakan memberatkan para profesi penulis buku, dikarenakan



umumnya jatah royalti penulis hanya 10%-15% dari penjualan, sehingga nantinya pendapatan yang didapat penulis cukup kecil. Belum lagi pajak penulis buku harus dikalikan layer pajak yaitu tarif PPh Pasal 17. Penulis buku ini juga menginginkan pajak royalti harus bersifat final dengan tarif 1% seperti tarif yang dikenakan pada UMKM. (news.ddtc.co.id, 2017).

Pemungutan pajak atas buku tidak hanya dibebankan kepada penulis saja, melainkan juga dibebankan kepada penerbit hingga toko buku. Terdapat PPN, PPh royalti, dan PPh penerbit. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013, PPN untuk buku pelajaran umum, pelajaran agama, dan kitab suci memang sudah dihapuskan. Selain buku yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tetap kena tarif PPN sebesar 10%. PPN ini bukan ditanggung oleh penerbit melainkan oleh pembeli. Oleh karena itu, harga buku menjadi semakin mahal. Harga buku yang mahal dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan berakibat pada rendahnya minat baca masyarakat. Begitupun juga dengan tingginya royalti penulis yang dapat menurunkan minat menulis sehingga produktivitas penerbitan buku juga dapat menurun.

Pemungutan pajak harus memperhatikan asas-asas, yaitu asas *equity*, *revenue productivity*, *ease of administration*, dan *neutrality*. Ketidakadilan yang dirasa penulis dan konsumen buku mengenai tingginya tarif pajak tidak sesuai dengan salah satu asas pemungutan pajak, yaitu asas *equity* dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Pajak yang dikenakan pada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas royalti penulis dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas buku berdasarkan asas-asas pemungutan pajak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis memenuhi asas-asas pemungutan pajak?
2. Apakah pemungutan PPN pada buku memenuhi asas-asas pemungutan pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kesesuaian pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dengan asas-asas pemungutan pajak.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pemungutan PPN atas buku dengan asas-asas pemungutan pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan para mahasiswa, pelajar, dan pembaca. Serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai PPh Pasal 23 atas royalti penulis dan PPN atas buku.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi dalam bidang perpajakan untuk wajib pajak terutama penulis buku, untuk

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengenaan pajak PPN untuk buku dan PPh 23 atas royalti penulis agar adil dan tidak memberatkan para konsumen buku dan penulis. Sehingga penulis buku dapat termotivasi untuk terus memproduksi buku dan dapat berakibat dalam peningkatan industri buku di Indonesia.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.



**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang objek penelitian dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

**BAB V : KESIMPULAN**

Berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penellitian berikutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Literatur

Peneliti akan melakukan tinjauan pustaka dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pajak atas buku. Diharapkan tinjauan pustaka ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian mengenai Analisis Pemungutan PPh Pasal 23 atas Royalti Penulis dan PPN atas Buku ditinjau dari Asas-asas Pemungutan Pajak merupakan suatu hal baru untuk dijadikan tema penelitian, masih belum terdapat penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Peneliti berupaya untuk menyajikan penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang hampir sama.

Penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh Chairani dan Rosdiana (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Buku”. Penelitian tersebut akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**

#### Penelitian Terdahulu

<b>Peneliti</b>	Chairani dan Rosdiana (2014)
<b>Judul</b>	Evaluasi Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Buku
<b>Tujuan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengevaluasi fasilitas pembebasan PPN atas buku pelajaran dengan mengacu pada teori kebijakan pajak yang baik sesuai dengan <i>American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)</i>.</li> <li>2. Untuk mengetahui alasan pemilihan fasilitas pembebasan PPN</li> </ol>

Metode Penelitian	Kualitatif deskriptif
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori kebijakan pajak yang baik sesuai dengan AICPA terdiri dari prinsip <i>certainty</i>, <i>convenience</i>, <i>neutrality</i>, dan <i>apropriate government revenue</i>. Jika dilihat dari prinsip <i>certainty</i>, peraturan pembebasan PPN pada buku pelajaran belum menjelaskan objek pajaknya lebih dalam sehingga masih membingungkan penerbit. Dalam prinsip <i>convenience</i>, belum ada peraturan mengenai dokumen yang dibutuhkan. Berdasarkan prinsip <i>neutrality</i>, pembebasan PPN akan menimbulkan distorsi pada konsumen yang PKP. Dan berdasarkan prinsip <i>apropriate government revenue</i>, pembebasan PPN akan mengurangi penerimaan negara.</li> <li>2. Fasilitas pembebasan PPN dipilih karena administrasi untuk pajaknya lebih mudah dan tidak rumit serta lebih menguntungkan konsumen, produsen, distributor dan negara. Sedangkan jika menggunakan alternatif lain seperti pemberian subsidi untuk buku, dinilai akan menambah pengorbanan pemerintah.</li> </ol>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chairani dan Rosdiana yaitu sama-sama membahas mengenai PPN atas buku. Selain itu juga sama-sama membahas mengenai alasan pemilihan fasilitas pembebasan PPN atas buku. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dan subjek penelitiannya. Penelitian ini membahas mengenai pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dan PPN atas buku, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai PPN atas buku pelajaran umum saja. Teori yang digunakan untuk menganalisis juga berbeda, penelitian ini menggunakan teori asas pemungutan pajak, sedangkan

penelitian terdahulu mengevaluasi menggunakan teori kebijakan pajak yang baik berdasarkan AICPA.

## **2.2. Tinjauan Teori**

Peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Buku Ditinjau dari Asas-Asas Pemungutan Pajak, menggunakan beberapa konsep sebagai landasan pemikiran. Konsep yang terkait dalam penelitian antara lain: konsep dasar-dasar pajak, konsep PPN, konsep PPh Pasal 23, dan konsep pajak atas buku.

### **2.2.1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan ekonomi bagi suatu negara. Penerimaan dari pajak menjadi salah satu instrumen untuk mengatur jalannya perekonomian suatu negara. Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak. Beberapa ahli pajak telah mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Definisi pajak menurut Prof Dr. Rachmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2009: 1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2016: 1):

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”



Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kewajiban orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk berkontribusi secara teratur kepada negara, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban setiap Wajib Pajak (orang pribadi dan badan) kepada negara yang telah diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa dan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung untuk membiayai keperluan negara. Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan sarana prasarana umum.

### **2.2.2. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* adalah menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan cara *ekstensifikasi* maupun *intensifikasi* pemungutan pajak. Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur adalah pajak berfungsi untuk mengatur masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2009: 2).

### **2.2.3. Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2016: 7)terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya pertamakali dilihat berdasarkan subjeknya atau keadaan pribadi Wajib Pajak kemudian melihat objeknya untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar. Contohnya adalah PPh.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, baik berupa benda, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya adalah PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya adalah PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan lain-lain.

#### 2.2.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah wewenang pemerintah untuk memungut kewajiban warga negara dalam membayar pajak yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh DPR agar tercipta keadilan baik bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, seperti ketentuan mengenai pajak yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara harus berdasar undang-undang”, maka pemerintah tidak boleh memungut pajak jika tidak ada dalam undang-undang.

Menurut Adam Smith (1776) sebagaimana dikutip oleh Halim, Rangga dan Dara (2017: 2), agar pemungutan pajak tersebut adil, maka harus memperhatikan empat asas yang disebut sebagai *four maxims* yang terdiri dari:

1. *Equity* (asas keadilan): pemungutan pajak harus dilakukan adil dan merata sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang dimiliki setiap Wajib Pajak. Tidak boleh ada diskriminasi diantara Wajib Pajak.

2. *Certainty* (asas kepastian): semua pungutan pajak, baik tarif maupun pengenaannya harus pasti dan jelas berdasarkan UU serta tidak boleh sewenang-wenang. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan.
3. *Convenience* (asas pemungutan pajak tepat waktu): pemungutan pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak, misalnya pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.
4. *Efficiency* (asas efisiensi): biaya pemungutan pajak diusahakan seefisien dan sehemat mungkin. Sehingga biaya memungut tidak lebih besar daripada hasil pajak yang dipungut. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara.

Dr. Haula Rosdiana dalam bukunya(2012: 158) menjelaskan beberapa asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak dalam Rosdiana berpijak kepada penentuan sasaran reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 1984, enam sasaran utama tersebut antara lain:

1. Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari penerimaan negara yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.
2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.
3. Menjamin adanya kepastian.
4. Sederhana.



5. Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.
6. Memberikan dampak yang positif dalam bidang ekonomi.

Dasar pijakan penentuan sasaran-saran reformasi tersebut adalah *revenue productivity*, *equity/equality*, dan *ease of administration*. Menurut Mansury dalam Rosdiana dan Irianto (2012: 158) mengatakan bahwa:

“Itulah tiga asas yang seharusnya dipegang teguh sistem PPh kita yang seimbang memerhatikan semua kepentingan. The Revenue Adequacy Principle adalah kepentingan Pemerintah, the Equity Principle adalah kepentingan masyarakat, dan the Certainty Principle adalah untuk kepentingan Pemerintah dan masyarakat”

Dengan demikian, terdapat beberapa asas-asas pemungutan pajak yang penting agar tercapai sistem perpajakan yang baik antara lain:

1. *Equity/Equality*, pemungutan pajak dikatakan adil apabila dikenakan sebanding dengan kemampuan membayar setiap Wajib Pajak dan menerima manfaat yang sesuai dari negara. Asas keadilan mencakup *horizontal equity* dan *vertical equity*. *Horizontal equity* adalah sistem pemungutan pajak dikatakan adil secara horizontal apabila setiap Wajib Pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomi yang sama akan dikenakan beban pajak yang sama. Sedangkan *vertical equity* adalah keadilan yang terjadi ketika Wajib Pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda akan diperlakukan tidak sama.
2. *Revenue Productivity*, asas yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pemungutan pajak dikatakan optimal jika

mendapatkan jumlah penerimaan yang memadai dan memenuhi asas keadilan.

3. *Ease of Administration*:

- a. *Certainty*, bahwa setiap ketentuan pemungutan pajak harus ada kepastian dan kejelasan mengenai objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, dan prosedur pengenaan pajak. Kepastian yang jelas ini harus dimengerti baik bagi Wajib Pajak maupun petugas pajak.
- b. *Efficiency*, pajak dikatakan efisien jika dari segi petugas pajak, biaya pemungutan pajak lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan dari segi Wajib Pajak, pemungutan dikatakan efisien jika biaya kewajiban perpajakan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak relatif rendah.
- c. *Convenience of Payment*, pemungutan pajak yang baik harus memperhatikan kondisi Wajib Pajak pada saat yang nyaman, misalnya pada saat Wajib Pajak sedang menerima penghasilan.
- d. *Simplicity*, peraturan pemungutan pajak kesederhanaan dan kemudahan agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.

4. *Neutrality*, pemungutan pajak harus netral, artinya adalah pajak harus bebas dari distorsi terhadap konsumsi maupun terhadap produksi serta faktor ekonomi lainnya. Pajak tidak boleh mempengaruhi pilihan keputusan Wajib Pajak dalam menghasilkan barang ataupun melakukan konsumsi.

### 2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat tiga sistem pemungutan atau cara yang digunakan untuk menentukan, menghitung, dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang, yaitu (Resmi, 2016: 11):

1. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah atau fiskus. Fiskus atau petugas pajak berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif. Namun sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia setelah adanya reformasi perpajakan pada tahun 1984.
2. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat aktif, KPP tidak boleh untuk ikut campur dan hanya sebagai pengawas saja. Indonesia menganut sistem ini sejak adanya reformasi perpajakan pada tahun 1984 sampai saat ini.
3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Jadi Wajib Pajak meminta tolong kepada pihak ketiga (bukan Wajib Pajak atau fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. KPP juga hanya sebagai

pengawas. Biasanya di Indonesia menggunakan sistem ini untuk PPh

Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4(2), dan PPN.

Pada dasarnya Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* dan *With Holding System*.

### 2.2.6. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 9), terdapat empat tarif pajak yang dapat dikenakan pada Wajib Pajak yang terdiri dari:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.

3. Tarif progresif

Tarif berupa persentase yang besarnya akan semakin meningkat jika jumlah yang dikenai pajak juga semakin besar. Seperti Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

- 1) Sampai dengan Rp 50.000.000 dikenai tarif pajak 5%
- 2) Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 dikenai tarif 15%
- 3) Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 dikenai tarif 25%
- 4) Di atas Rp 500.000.000 dikenai tarif 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- 1) Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar



- 2) Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif degresif

Tarif berupa persentase yang digunakan semakin kecil atau menurun jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### **2.2.7. Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan**

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 28, setiap Wajib Pajak diharuskan melakukan pembukuan dan pencatatan. Hal ini dilakukan agar perhitungan pajak lebih akurat dan memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang pada Surat Pemberitahuan (SPT).

Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Pembukuan diwajibkan kepada Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur mengenai peredaran bruto atau penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak final.

Wajib Pajak yang dikecualikan untuk tidak melakukan pembukuan namun wajib melakukan pencatatan adalah:

1. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

2. WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diperbolehkan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan syarat:

- a. Dalam satu tahun peredaran brutonya kurang dari Rp4.800.000.000
- b. Melakukan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

WPOP diperbolehkan menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN, sehingga tidak perlu membuat pembukuan, tetapi hanya membuat pencatatan saja. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, karena tidak semua WPOP memiliki pengetahuan mengenai akuntansi untuk membuat pembukuan.

NPPN adalah persentase tertentu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung penghasilan neto dalam satu tahun sebagai dasar untuk perhitungan PPh terutang. Penghasilan neto dihitung dari penghasilan bruto dikalikan persentase norma. Besarnya persentase norma dan pengelompokkan menurut jenis usaha dan wilayah diatur di dalam Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2015.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2015, setiap Wajib Pajak yang menggunakan NPPN dalam menghitung penghasilan neto harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000

2. Menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai PPh final
3. Menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

#### **2.2.8. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa yang berada di dalam daerah pabean (Waluyo, 2011:9). Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertahap di setiap jalur produksi dan distribusi. Maksudnya adalah PPN dikenakan sementara pada barang-barang dalam siklus produksi atau distribusi, kemudian PPN tersebut dibebankan pada pembeli berikutnya, melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan.

PPN hanya dikenakan pada barang atau jasa yang memiliki nilai tambah (*added value*) dalam sebuah transaksi. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan pada bahan baku atau tenaga kerja sebelum produk atau jasa yang baru dijual. PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri, PPN dikenakan pada konsumsi atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang ada di dalam negeri. Impor juga dikenakan PPN karena konsumsi barang atau jasa dilakukan di Indonesia. Pajak hanya dikenakan pada barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen akhir bukan pada saat barang-barang dalam proses produksi.

PPN merupakan pajak tidak langsung karena beban pembayaran pajaknya dialihkan kepada pihak lain, dalam hal ini ditanggung oleh konsumen, namun yang bertanggung jawab untuk menyetorkan PPN ke kas negara adalah penjual. Penjual akan menggunakan faktur pajak yang diterbitkannya sebagai bukti pungutan atas PPN terutang kepada konsumen dan kemudian penjual menyetorkan PPN yang sudah dipungut setiap masa pajak. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A, yang menjadi subjek PPN atau pihak yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, atau ekspor JKP.
2. Pengusaha kecil yang omsetnya kurang dari Rp 4.800.000.000 boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau JKP dari luar Daerah Pabean.

PPN dikenakan pada objek pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. BKP adalah barang berwujud yang dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU.
2. JKP adalah setiap kegiatan pelayanan yang bisa berupa barang, fasilitas dan kemudahan yang dapat digunakan atas dasar suatu perjanjian atau perbuatan hukum, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan

barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. JKP dikenakan pajak berdasarkan UU.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4, objek PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP.
7. Ekspor BKPTB oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.

Selain itu terdapat barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN atau bukan merupakan objek pajak. Menurut UU No. 42. Tahun 2009 Pasal 4A, barang-barang tertentu yang tidak dikenakan PPN (non BKP) adalah:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang



dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

4. Uang, emas batangan dan surat berharga.

Untuk jasa tertentu yang tidak dikenai PPN (non JKP) adalah:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa asuransi
5. Jasa keagamaan
6. Jasa pendidikan
7. Jasa kesenian dan hiburan
8. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
9. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
10. Jasa tenaga kerja
11. Jasa perhotelan
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum
13. Jasa penyediaan tempat parkir
14. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
15. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
16. Jasa boga dan katering

Terdapat dua jenis fasilitas PPN (UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 16B), yaitu:

1. PPN tidak dipungut, yaitu fasilitas yang diberikan berkaitan dengan kegiatan memasukkan barang ke kawasan khusus untuk kepentingan tertentu. Konsumen tidak perlu membayar PPN terutang dan PKP juga tidak perlu untuk memungut PPN terutang karena ada fasilitas tersebut, namun PKP tetap menerbitkan faktur pajak. Pajak Masukan yang sudah dibayar atas perolehan BKP atau JKP dapat dikreditkan, sehingga menguntungkan PKP.
2. PPN dibebaskan, yaitu fasilitas yang diberikan berkaitan dengan penggunaan barang atau pemanfaatan jasa yang mengandung sifat tertentu. PKP tidak perlu memungut PPN terutang dan konsumen tidak perlu membayar PPN yang terutang tersebut. PKP yang diberikan fasilitas pembebasan PPN tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar untuk memproduksi BKP atau JKP. Oleh karena itu biasanya Pajak Masukan akan dibebankan pada harga jual.

Kewajiban memungut PPN dibebaskan kepada orang atau badan yang menyerahkan:

- a. BKP yang bersifat strategis (PP No. 31 Tahun 2007) adalah barang yang penting bagi masyarakat atau untuk pengembangan usaha tertentu. Contoh BKP yang bersifat strategis antara lain: barang modal, makanan ternak, bibit atau benih, bahan baku perak, bahan baku uang kertas, air bersih yang dialirkan oleh Perusahaan Air Minum, listrik kurang dari 6.600 watt, dan Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

- b. BKP tertentu (PP No. 38 Tahun 2003) adalah barang yang diperlukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan nasional yang dikelola oleh unit-unit pemerintah. Contoh BKP dan JKP tertentu yang dibebaskan dari PPN adalah rumah sederhana, senjata, amunisi, vaksin polio, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, kapal laut, pesawat udara, kereta api, peralatan untuk mendukung pertahanan nasional, jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut, jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara, jasa perawatan kereta api, jasa kontraktor untuk bangunan ibadah jasa persewaan rumah sederhana, dan jasa untuk pertahanan nasional.

PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP dengan tarif tunggal yaitu sebesar 10% untuk di dalam Daerah Pabean atau 0% untuk barang yang diekspor. Tarif 0% bukan berarti dibebaskan dari pengenaan PPN, PKP harus tetap memungut pajak dan lapor ke SPT, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dapat dikreditkan. PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor nilai ekspor, atau nilai lain. Mekanisme pengenaan PPN secara umum adalah:

1. Pada saat PKP menjual BKP atau menyerahkan JKP maka diwajibkan untuk memungut PPN dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti telah memungut. Bagi penjual, PPN yang dipungut merupakan Pajak Keluaran.

2. PKP akan memungut PPN pada saat pembeli membeli BKP atau memperoleh JKP dan pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa Faktur Pajak. Bagi pembeli, ketika membayar pajak terutang tersebut dinamakan Pajak Masukan.
3. Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran, jika jumlah Pajak Masukan lebih kecil dari pada jumlah Pajak Keluaran maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Namun, apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) pada akhir tahun pajak atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan pemungutan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

#### **2.2.9. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilannya dalam tahun pajak (UU No. 36 Tahun 2008). Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dan sudah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang sesuai dengan peraturan perpajakan memiliki kewajiban perpajakan.

Salah satu jenis pajak adalah PPh Pasal 23. Menurut Resmi (2016: 327), PPh pasal 23 adalah:

“pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

(BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.”

PPh Pasal 23 termasuk ke dalam PPh tidak final, yaitu pajak penghasilan yang tidak langsung dikenakan saat menerima sumber penghasilan, namun langsung digabungkan dengan penghasilan lain selama satu tahun pajak dan dihitung dengan tarif pajak progresif. PPh yang bersifat tidak final, pajak penghasilannya akan diperhitungkan kembali dan biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selain itu PPh yang sudah dipotong oleh pihak lain dijadikan kredit pajak sebagai pengurang PPh terutang pada SPT Tahunan.

Umumnya pada PPh, yang berhutang pajak adalah yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa, namun pada PPh Pasal 23 yang bertanggung jawab atas pelunasan hutang adalah pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa. PPh Pasal 23 menggunakan metode *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau pemberi penghasilan untuk menentukan besarnya pajak terutang dan memotong pajak terutang Wajib Pajak sebagai penerima penghasilan. Pihak ketiga yang bertindak sebagai pemotong pajak akan memberikan bukti potong pajak kepada Wajib Pajak sebagai bukti dan dapat diakui sebagai kredit pajak atas pemotongan pajak dalam tahun berjalan.

Setelah melakukan pemotongan pajak, maka pihak ketiga akan menyetorkan ke kas negara dan melaporkannya dalam SPT Masa secara periodik setiap bulan.



PPh Pasal 23 dipotong oleh pihak ketiga yang terdiri dari:

1. Badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
2. Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, yaitu:
  - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
  - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak atau yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan BUT. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23, pajak dikenakan pada objek pajak berupa penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dengan tarif pajak sebesar:

1. 15% dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali dividen untuk orang pribadi bersifat final
  - b. Bunga, termasuk bunga premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian uang
  - c. Royalti
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

2. 2% dari jumlah bruto atas:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan tarif pajak 100% lebih tinggi dari tarif dasarnya.

#### **2.2.10. Pajak pada Buku**

Buku merupakan salah sumber informasi yang akurat. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari tingginya minat baca masyarakat negara tersebut. Banyak kendala untuk menjamin ketersediaan buku bagi masyarakat sehingga minat baca rendah, salah satu penyebabnya dikarenakan harga buku yang semakin mahal bagi masyarakat. Mahalnya harga buku dikarenakan adanya pengenaan pajak disetiap proses produksi buku sampai distribusi.

Proses penerbitan sebuah buku dimulai dari penulisan naskah oleh penulis. Penulis akan mendapatkan imbalan dari penerbit berupa royalti sebesar 8%-10% dari harga penjualan, biasanya jika buku yang diterbitkan best seller maka royalti yang didapatkan akan naik menjadi 15%. Royalti yang diterima merupakan penghasilan bagi penulis dan royalti diberikan setiap enam bulan sekali dalam setahun. Setelah memberikan royalti kepada penulis, selanjutnya penerbit akan langsung memotong PPh pasal 23 kepada penulis atas royalti yang diterima sebesar 15% bagi yang memiliki NPWP. Sedangkan bagi penulis yang tidak

memiliki NPWP akan dikenakan tarif PPh 23 sebesar 30%. Pajak yang telah dipotong akan menjadi pengurang pajak terutang saat mengisi SPT Tahunan dengan syarat dapat menunjukkan bukti potong dari penerbit. Kemungkinan bisa terjadi lebih bayar dan boleh diminta untuk dikembalikan.

Selanjutnya, setelah memungut PPh 23 atas royalti penulis, maka naskah diserahkan kepada penerbit untuk diedit penulisannya, tata letak, desain sampul, ilustrasi, dan membaca ulang naskah. Keseluruhan proses tersebut dinamakan pokok produksi, biasanya menghabiskan biaya sebesar 20%-25% dari harga jual. Setelah proses produksi selesai, maka buku siap dicetak. Namun tidak semua penerbit mempunyai percetakan sendiri. Biasanya penerbit harus mencetak di percetakan dan kertas dikenakan PPN sebesar 10%.

Dari percetakan, buku siap di jual di toko-toko melalui distributor. Namun, tidak semua penerbit mempunyai distributor juga. Biasanya penerbit yang mendistribusikan buku lewat distributor maka akan dikenakan ongkos sebesar 45%-50% dari harga jual buku. Kemudian saat dijual di toko buku, buku harus dikenakan PPN kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual buku. Tidak semua buku dipungut PPN, pemerintah membebaskan beberapa jenis buku dari pajak seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama atas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

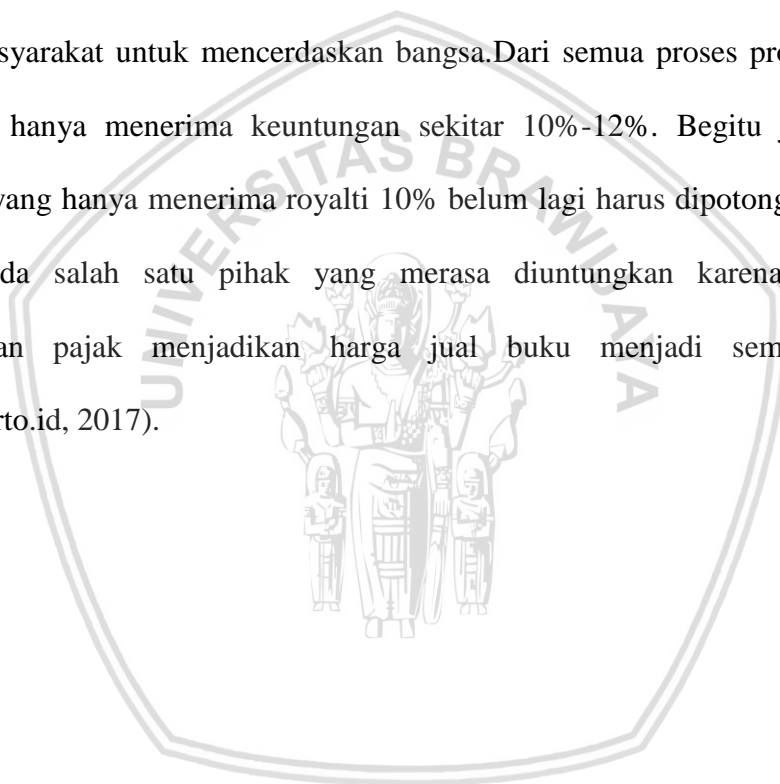
Menurut PMK No. 122 Tahun 2013, terdapat tiga kategori buku yang dibebaskan dari PPN atas impor atau penyerahannya, yaitu:

1. Buku pelajaran umum berupa fiksi dan nonfiksi, tidak termasuk buku hiburan, buku musik, buku roman populer, buku sulap, buku iklan, buku promosi suatu usaha, buku katalog di luar keperluan pendidikan, buku karikatur, buku horoskop, buku horor, buku komik, dan buku reproduksi lukisan.
2. Kitab suci:
  - a. Kitab suci agama Islam meliputi kitab suci Al Quran, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan Jus Amma
  - b. Kitab suci agama Kristen Protestan meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian
  - c. Kitab suci agama Katolik meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian
  - d. Kitab suci agama Hindu meliputi kitab suci Weda, Smerti, dan Sruti, Upanisad, Itihasa, Purnama termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian
  - e. Kitab suci agama Budha meliputi kitab suci Tripitaka termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian

- f. Kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.

3. Buku pelajaran agama berupa fiksi dan nonfiksi

Pembebasan PPN atas buku diharapkan harga buku menjadi lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan dan dapat meningkatkan minat baca masyarakat untuk mencerdaskan bangsa. Dari semua proses produksi buku, penerbit hanya menerima keuntungan sekitar 10%-12%. Begitu juga dengan penulis yang hanya menerima royalti 10% belum lagi harus dipotong pajak 15%. Tidak ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan karena banyaknya pengenaan pajak menjadikan harga jual buku menjadi semakin mahal (www.tirto.id, 2017).





### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian berupa tingkah laku atau persepsi yang dapat diamati dari perilaku orang-orang (Moleong, 2014: 6).

Menurut Sugiyono (2016: 13), penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan data berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan analisis data deskriptif berupa kata-kata atau gambar secara rinci dengan cara mengungkap data sesuai fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian.

Melalui metode kualitatif deskriptif, penulis ingin memberikan gambaran secara jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang sedang diteliti serta mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti ingin menggambarkan secara rinci mengenai pengenaan pajak pada buku, baik PPN untuk konsumen buku dan PPh Pasal 23 atas royalti penulis. Kemudian dilakukan

analisis pengenaan pajak pada buku dan kesesuaiannya dengan teori asas-asas pemungutan pajak.

Jenis penelitian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif dari berbagai tipe subjek yang ditemui tentang perspektif yang dialaminya (Moleong, 2014: 15). Pendekatan fenomenologi dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk memeriksa secara terperinci mengenai fenomena sosial yang sedang terjadi dan mendeskripsikannya secara nyata dan apa adanya.

Penelitian ini berfokus pada perspektif penulis buku mengenai pengalamannya ketika penghasilannya dipotong pajak atas royalti sesuai dengan PPh Pasal 23, serta perspektif dari konsumen buku mengenai pengalaman mereka ketika dikenakan PPN atas buku. Peneliti juga berfokus pada pandangan subjektif dan pendapat dari ahli pajak sebagai pihak netral yang memiliki pemahaman literatur perpajakan yang lebih mendalam.

## **1.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti memerlukan data yang relevan dan akurat agar hasil pembahasan dalam penelitian dapat optimal. Menurut Sugiyono (2016: 131), sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Peneliti mengumpulkan data primer secara langsung melalui wawancara, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau

informasi yang penting dan lebih mendalam. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data kepada beberapa orang untuk dipilih menjadi sampel dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti (Sugiyono, 2016: 219). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengenalan pajak pada buku, antara lain:

- a. Penulis buku, berperan sebagai Wajib Pajak yang membayar pajak atas royalti sesuai dengan PPh Pasal 23, yaitu kepada:
  - 1) Bapak Setyo Tri Wahyudi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai penulis buku dan pekerjaan utama sebagai dosen.
  - 2) Bapak Mashdar Zainal yang memiliki pekerjaan utama sebagai penulis buku.

Peneliti ingin membandingkan pendapat dari kedua narasumber mengenai pengaruh pemungutan PPh pasal 23 atas royalti terhadap penghasilan dan minat menulis mereka.

- b. Konsumen buku, berperan sebagai Wajib Pajak yang membayar PPN atas buku, yaitu kepada:
  - 1) Indriatu Nurul Hidayah, seorang Ibu Rumah Tangga yang merupakan konsumen buku.

- 2) Putri Nabila, seorang mahasiswa yang merupakan konsumen buku.
  - c. Ahli pajak yaitu Bapak Hendi Subandi yang berprofesi sebagai dosen pajak. Ahli pajak dianggap sebagai narasumber yang memiliki pengetahuan secara mendalam mengenai literasi perpajakan.
2. Data sekunder adalah data penelitian yang tidak diperoleh secara langsung dan melalui media perantara atau pihak ke tiga. Peneliti memperoleh data sekunder melalui berbagai sumber bahan cetak seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui penelusuran internet terkait informasi dan data yang dibutuhkan.

Menurut Sugiyono (2016: 225), data dapat dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner atau dokumentasi. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Literatur adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, undang-undang atau peraturan pemerintah dan informasi lainnya untuk memperoleh teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Data berupa dokumen yang sudah dikumpulkan akan ditelaah dan dikaji secara intens oleh peneliti. Selain itu, dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan berperan penting sebagai penguat informasi yang didapat peneliti dari metode wawancara. Peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur agar mendapatkan landasan teori yang banyak dan luas untuk membahas masalah dalam penelitian ini. Adapun dokumen yang dibaca dan dipelajari adalah sebagai berikut:

- a. Literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian.
  - b. Undang-Undang Perpajakan
  - c. Keputusan Menteri Keuangan
  - d. Peraturan Pemerintah
  - e. Surat Edaran Dirjen Pajak
2. Wawancara adalah proses memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab untuk menggali informasi lebih dalam. Peneliti akan melakukan wawancara secara terstruktur melalui tatap muka atau telepon. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas dan menanyakan permasalahan yang ada di dalam pedoman wawancara secara garis besar (Sekaran, 2016: 233). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian antara lain:
- a. Konsumen buku yang merupakan Wajib Pajak yang dikenakan PPN.  
Wawancara dilakukan untuk mengetahui persepsi atas pengenaan PPN pada buku dan fasilitas pembebasan PPN pada buku kategori tertentu.
  - b. Penulis buku yang merupakan Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 atas royalti. Wawancara dilakukan untuk mengetahui



permasalahan pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti dan persepsi terhadap kebijakan tersebut.

- c. Ahli pajak atau dosen perpajakan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara konsep terkait dengan pengenaan pajak pada buku, khususnya PPN atas buku dan PPh Pasal 23 atas royalti penulis.

Peneliti memilih teknik wawancara untuk mengumpulkan data dikarenakan dapat memperoleh data yang banyak dan dapat mengklarifikasi pertanyaan yang kurang jelas.

### 1.3. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016: 244) mengartikan analisis data adalah

“Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”

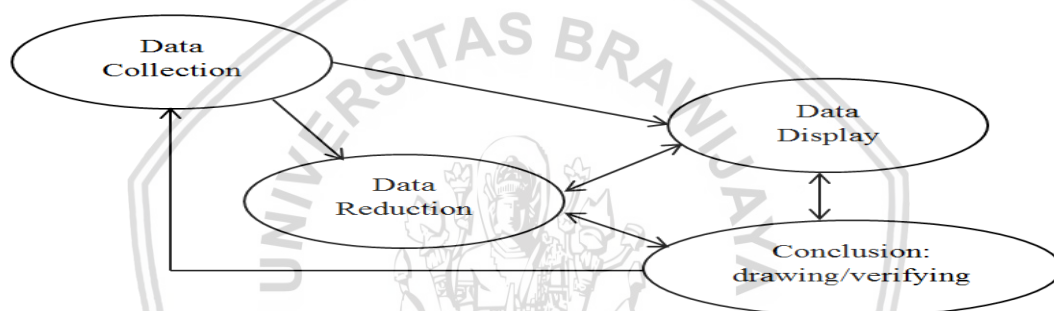
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis semua data yang sudah dikumpulkan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Analisis data dilakukan agar masalah yang diteliti dapat mudah dipahami. Peneliti akan menganalisis data yang didapatkan mengenai pengenaan pajak pada buku dengan teori asas-asas pemungutan pajak, apakah pengenaan pajak sudah memenuhi teori asas pemungutan pajak.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai datanya jenuh. Kejenuhan data diukur dengan tidak diperolehnya lagi data atau

informasi baru (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2016: 246). Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode analisis data menurut Miles & Huberman agar mendapatkan hasil analisis data yang kredibel. Langkah-langkah teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman disajikan dalam gambar berikut:

**Gambar 3.3.**

Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Sugiyono (2016: 247)

Analisis data model interaktif akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti mengumpulkan data-data dan informasi yang diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dan dari sumber sekunder dari literatur yang berkaitan serta Undang-Undang. Data primer berupa transkrip wawancara dapat dilihat dalam lampiran 1 sampai lampiran 5, sedangkan data sekunder yang berupa undang-undang dapat dilihat dalam lampiran 6 sampai lampiran 7. Data-data yang dikumpulkan digunakan untuk mencapai tujuan peneliti. Data yang didapat oleh peneliti adalah informasi mengenai pemungutan PPN atas buku dan

pemungutan PPh Pasal 23 atas Royalti Penulis dari sudut pandang Wajib Pajak yang dipungut serta persepsi dari sudut pandang ahli pajak yang bersifat netral.

## 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yang meliputi merangkum, memilih hal-hal pokok, serta mencari tema dan pola dari data yang sudah didapat. Mereduksi data membantu untuk memberikan gambaran yang jelas bagi peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data dari hasil wawancara yang sudah dilakukan pada lampiran 1 sampai lampiran 5 kepada narasumber untuk menemukan pola yang sama. Hasil wawancara dari ke lima narasumber nantinya peneliti hanya akan memilih data-data yang berkaitan dengan penelitian saja.

## 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Peneliti memilih menyajikan data ke dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif untuk memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan yang sedang terjadi. Peneliti menyajikan data yang hanya berkaitan dengan masalah penelitian di dalam bab 4.

## 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion: Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan. Awalnya, kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berubah menjadi kesimpulan yang kredibel apabila didukung oleh bukti-bukti

yang valid. Namun, peneliti tetap harus melakukan verifikasi atau pengecekan kembali kebenaran kesimpulan yang sudah diambil, dengan cara mengecek kembali proses reduksi dan penyajian data untuk meminimalisir adanya kesalahan. Setelah proses verifikasi, kemudian peneliti akan mendapatkan kesimpulan yang kredibel. Peneliti menarik kesimpulan dari analisis yang sudah dilakukan di dalam bab 4.

### **3.3.1. Keabsahan Data**

Menurut Sekaran (2016: 268), data yang dilaporkan oleh peneliti dapat dinyatakan valid apabila datanya mencerminkan apa yang terjadi sesungguhnya pada objek yang diteliti. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Uji Kredibilitas. Kredibilitas adalah ukuran kepercayaan atau kebenaran data yang dikumpulkan oleh peneliti (Moleong, 2014: 324). Kredibilitas data yang dikumpulkan akan diperiksa melalui kelengkapan data yang sudah diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.

Peneliti melakukan pengujian kredibilitas dengan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik keabsahan data dengan melakukan pemeriksaan melalui sumber lainnya. Peneliti mencocokkan hasil yang diperoleh dari wawancara dengan cara membandingkan sumber yang didapat dari narasumber yang satu dengan narasumber lainnya. Peneliti membandingkan hasil wawancara mengenai pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dari narasumber yang berupa penulis buku pertama dengan penulis buku yang kedua (lampiran 1 dan lampiran 2) dan membandingkan mengenai pengenaan PPN atas buku kepada konsumen buku pertama dengan konsumen buku kedua (lampiran 3 dan 4).

Selanjutnya adalah mencari pola atau jawaban yang sama dari kedua narasumber tersebut, jika jawaban dari kedua narasumber sama maka dapat dikatakan data yang diambil sudah absah. Data yang sudah didapatkan dari wawancara akan dicocokkan dengan data sekunder yaitu dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian terdapat dalam tinjauan pustaka pada bab 2 dan peraturan-peraturan yang berkaitan (lampiran 6 sampai lampiran 7).





## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### 4.1. Gambaran Umum Proses Penerbitan Buku

Sebuah buku sebelum diterbitkan dan dijual di toko buku harus melewati mata rantai yang panjang. Proses penerbitan buku dimulai dari penyerahan naskah oleh penulis sampai akhirnya ditentukan harga jualnya dan dijual di toko buku. Dalam proses penerbitan buku melibatkan banyak profesi, mulai dari pengarang atau penulis sebagai penyedia konten, penerbit, editor (penyunting), layouter (penata letak), ilustrator, desain grafis, percetakan, dan distributor yang membantu mendistribusikan ke toko-toko buku.

Proses penerbitan buku yang pertama dimulai dari penyerahan naskah oleh penulis ke penerbit. Saat menyerahkan naskah, penulis dan penerbit akan melakukan perjanjian terkait sistem pembayaran. Penulis bisa memilih sistem jual putus atau royalti. Sistem jual putus adalah cara pembayaran dimuka oleh penerbit sesuai harga kesepakatan. Biasanya setiap penerbit sudah mempunyai standar harga untuk setiap jenis naskah. Penulis hanya akan menerima satu kali pembayaran saja, yaitu saat naskah diserahkan ke penerbit. Setelah pembayaran dilakukan, maka seluruh hak atas naskah akan dipegang sepenuhnya oleh penerbit. Risiko jika menggunakan sistem ini adalah penulis tidak akan mendapatkan penghasilan lagi meskipun buku yang diterbitkan menjadi laris di pasaran. Sistem royalti adalah pembayaran yang dihargai

sesuai dengan jumlah buku terjual dalam periode tertentu. Biasanya penerbit membayar royalti sebesar 8%-10% dari harga penjualan setiap enam bulan sekali dalam setahun.

Selanjutnya, naskah diserahkan kepada penerbit untuk diedit penulisannya, tata letak, desain sampul, ilustrasi, dan membaca ulang naskah. Keseluruhan proses tersebut dinamakan pokok produksi, biasanya menghabiskan biaya sebesar 20%-25% dari harga jual. Biasanya dalam proses ini, harga jual buku sudah bisa ditentukan dengan mempertimbangkan harga kotor, bahan baku produksi dan tingkat ketenaran penulis.

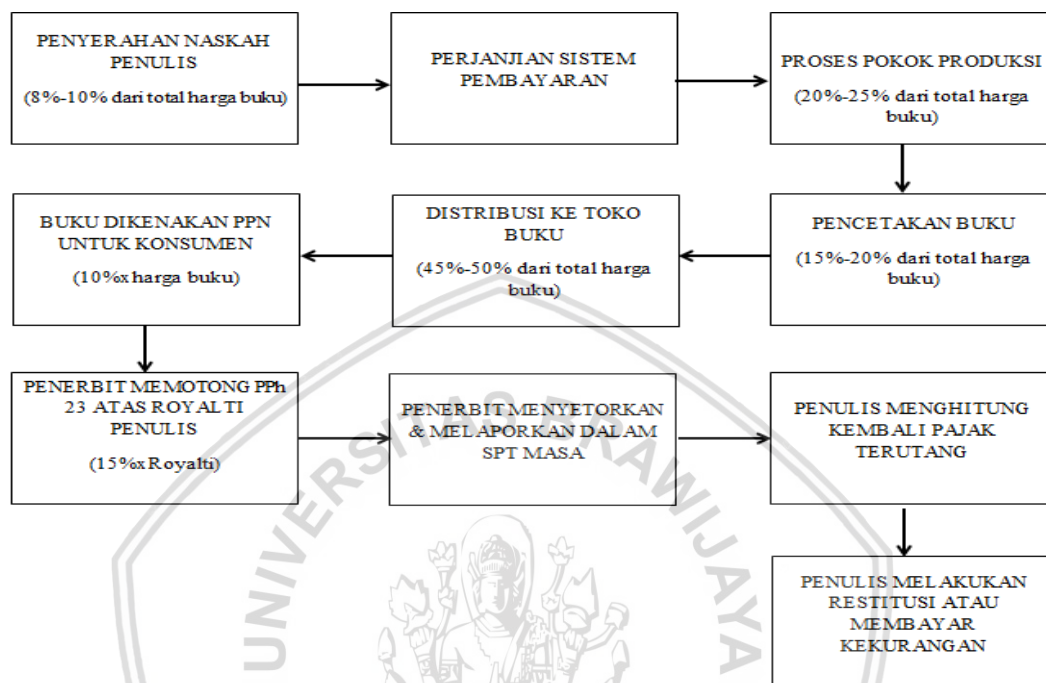
Setelah proses produksi selesai, maka buku siap dicetak. Biasanya menghabiskan biaya kurang lebih 15%-20%. Tidak semua penerbit mempunyai percetakan sendiri, penerbit harus mencetak di percetakan dan pembelian kertas yang digunakan untuk mencetak buku akan dikenakan PPN sebesar 10%.

Dari percetakan, buku siap di jual di toko-toko melalui distributor. Namun, tidak semua penerbit mempunyai distributor juga. Biasanya penerbit yang mendistribusikan buku lewat distributor maka akan dikenakan ongkos sebesar 45%-50% dari harga jual buku. Kemudian saat dijual di toko buku, buku harus dikenakan PPN kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual buku. Tidak semua buku dipungut PPN, pemerintah membebaskan beberapa jenis buku dari pajak seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama atas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penerbit memberikan royalti kepada penulis setiap enam bulan sekali dalam satu tahun. Penghasilan penjualan buku selama 6 bulan akan dikalikan persentase royalti sebesar 10% dan diberikan kepada penulis. Selanjutnya penerbit akan langsung memotong pajak atas royalti sesuai dengan PPh Pasal 23 kepada penulis atas royalti yang diterima sebesar 15% bagi yang memiliki NPWP. Bagi penulis yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 30%. Penerbit berkewajiban untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis ke dalam SPT Masa.

Pada akhir tahun, penulis menghitung kembali pajak yang telah dipotong oleh Penerbit. Pajak yang telah dipotong akan menjadi pengurang pajak terutang saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan syarat dapat menunjukkan bukti potong dari penerbit. Kemungkinan bisa terjadi lebih bayar jika pajak terutang lebih kecil daripada pajak yang telah dipotong, namun jika pajak terutang lebih besar daripada pajak yang telah dipotong maka penulis harus membayar kekurangan pajaknya. Apabila terjadi kelebihan pajak, maka Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Dari semua proses produksi buku, penerbit hanya menerima keuntungan sekitar 10%-12%. Begitu juga dengan penulis yang hanya menerima royalti 10% belum lagi harus dipotong pajak 15%. Tidak ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan, karena banyaknya pengenaan pajak menjadikan harga jual buku menjadi semakin mahal.

**Gambar 4. 1.****Alur Penerbitan Buku**

Sumber: [www.tirto.id](http://www.tirto.id), diolah peneliti, 2018

#### 4.1.1. Tarif dan Perhitungan Pajak

##### 1. PPh Pasal 23 atas Royalti Penulis

- 1) Cara menghitung pajak atas royalti penulis, adalah:
- 2) Menghitung penghasilan bruto berupa royalti dengan cara penghasilan penjualan dikali dengan royalti sebesar 10%.
- 3) Menghitung PPh Pasal 23 dengan cara penghasilan bruto dikali 15% (tarif untuk royalti).
- 4) Menghitung penghasilan neto, bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - a. Jika Wajib Pajak memilih melakukan pembukuan, maka untuk menghitung penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

- b. Jika Wajib Pajak memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), maka untuk menghitung penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikali dengan persentase norma. Besarnya persentase norma bagi penulis adalah 50% sesuai dengan PER-17/PJ/2015 lampiran 1 (Kegiatan Pekerja Seni KLU: 90002).

Wajib Pajak yang menggunakan norma harus memenuhi syarat, yaitu penghasilan brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun, wajib melakukan pencatatan, dan harus lapor kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama tiga bulan sejak tahun pajak yang bersangkutan (S-639/PJ.03/2017).

- 5) Menghitung Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP Wajib Pajak
  - a. Rp 54.000.0000 untuk Wajib Pajak sendiri
  - b. Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak status kawin
  - c. Rp 54.000.000 tambahan untuk istri yang bekerja
  - d. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan maksimal tiga orang untuk setiap keluarga.
- 6) Menghitung pajak terutang yaitu Penghasilan Kena Pajak dikali dengan tarif progresif sesuai UU PPh Pasal 17 sebagai berikut:
  - a. Rp 0 – Rp 50.000.000 : tarif 5%

- b. Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 : tarif 15%
  - c. Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 : tarif 25%
  - d. Diatas Rp 500.000.000 : tarif 30%
- 6) Menghitung pajak yang harus dibayar yaitu pajak terutang dikurangi pajak atas royalti PPh Pasal 23. Jika pajak terutang lebih besar dari pada pajak atas royalti, maka akan terjadi lebih bayar dan boleh diminta kembali kelebihannya kepada petugas pajak.

Perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti penulis akan dicontohkan dalam ilustrasi berikut:

Seorang penulis novel yang sudah memiliki NPWP, dalam satu tahun sudah menerbitkan buku sebanyak 30.000 eksemplar dengan harga Rp 50.000 per buku. Penulis tersebut memilih menghitung pajak atas royaltinya menggunakan NPPN. Maka penghitungan pajak yang harus dibayar oleh penulis tersebut adalah:

- 1) Penghasilan bruto,  $Rp\ 50.000 \times 30.000 \times 10\% = Rp\ 150.000.000$
- 2) PPh Pasal 23,  $15\% \times Rp\ 150.000.000 = Rp\ 22.500.000$
- 3) Penghasilan Neto,  $Rp\ 150.000.000 \times 50\% = Rp\ 75.000.000$
- 4) Penghasilan Kena Pajak,  $Rp\ 75.000.000 - Rp\ 54.000.000 = Rp\ 21.000.000$
- 5) Pajak Terutang,  $Rp\ 21.000.000 \times 5\% = Rp\ 1.050.000$
- 6) Pajak yang harus dibayar,  $Rp\ 1.050.000 - Rp\ 22.500.000 = Rp\ 21.450.000$  (lebih bayar)



## 2. PPN Buku

Cara menghitung PPN buku yang kena pajak adalah:

- 1) Harga buku belum termasuk PPN,  $10\% \times \text{harga buku}$

Contoh, PPN:  $10\% \times \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 5.000$

Harga buku yang harus dibayar:  $\text{Rp } 50.000 + \text{Rp } 5000 = \text{Rp } 55.000$

- 2) Harga barang sudah termasuk PPN,  $10\% \times (100/110) \times \text{harga buku}$

Contoh, PPN:  $10\% \times (100/110) \times \text{Rp } 55.000 = \text{Rp } 5.000$

Harga buku Rp 55.000 sudah termasuk pajak Rp 5.000

### 4.2. Kewajiban Pemungutan Pajak Serta Peraturan Terkait

#### 4.2.1. Kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Buku dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Royalti Penulis

Pada tahun 2017, penerimaan pajak berkontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp 1.339,8 triliun yang terdiri dari pajak sebesar Rp 1.147,5 triliun dan dari kepabean dan cukai sebesar Rp 192,3 triliun. Dengan penerimaan terbesar berasal dari PPh non migas sebesar Rp 742,2 dan diikuti dengan penerimaan dari PPN dan PPnBM sebesar Rp 475,5.

**Gambar 4.2.****Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017**

Penerimaan Pajak dalam triliun				
Uraian	APBNP	Realisasi (sementara*)		
		Rp	% thd APBN-P	Δ% 2016 - 2017
Pajak Penghasilan	784.0	645.6	82.4%	-3.1%
- Migas	41.8	50.3	120.4%	39.4%
- Non Migas	742.2	595.3	80.2%	-5.5%
PPN & PPnBM	475.5	478.4	100.6%	16.0%
PBB	15.4	16.8	109.0%	-13.7%
Pajak Lainnya	8.7	6.7	77.0%	-16.8%
Jumlah	1,283.6	1,147.5	89.4%	3.8%

\*) Sampai dengan publikasi ini dirilis, angka realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 mengalami update dengan tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp4 triliun

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**Gambar 4.2.****Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2017**

BM	:	Rp35 triliun atau 105,0 persen (surplus Rp1,7 triliun) dari APBNP 2017 yaitu Rp33,3 triliun,
BK	:	Rp4,1 triliun atau 149,9 persen (surplus Rp1,4 triliun) dari APBNP 2017 yaitu Rp2,7 triliun,
Cukai	:	Rp153,3 triliun atau 100,1 persen (surplus Rp0,1 triliun) dari APBNP 2017 yaitu Rp153,2 triliun.

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Melihat besarnya kontribusi pajak terhadap perekonomian Indonesia, terutama dari PPh dan PPN, maka pemerintah mewajibkan masyarakat untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak telah diatur oleh pemerintah di dalam Undang-Undang. Ada banyak landasan hukum yang mengatur tentang pajak PPN atas buku dan PPh atas royalti penulis. Undang-Undang ini antara lain UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 42 Tahun 2009 tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

#### **4.2.2. Peraturan-Peraturan Terkait Pajak atas Buku dan Pajak atas Royalti**

##### **Penulis**

Berdasarkan catatan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada tahun 2015, penerbitan buku berkontribusi terhadap ekonomi nasional sebesar Rp 53,6 miliar atau 6,29% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Ekonomi Kreatif (Ekraf). Dari sisi ketenagakerjaan, subsektor penerbitan memberikan kontribusi sebesar 2,89% terhadap total tenaga kerja industri kreatif. Penerbit termasuk salah satu subsektor potensial dalam industri kreatif, karena menempati peringkat ke-5 dari 16 subsektor industri kreatif dalam kontribusi PDB Ekraf. Selain itu industri buku mengalami peningkatan sebesar 4,7% pada tahun 2011 dan menjadi 4,86% pada tahun 2012. Hal ini membuktikan bahwa industri penerbitan berpotensi untuk unggul dalam ekonomi global (Rambatan, 2015).

Eksistensi industri penerbitan buku perlu didukung oleh semua pihak karena peranannya yang sangat menjanjikan kemajuan ekonomi di Indonesia. Dukungan terhadap industri penerbitan buku ini dipandang penting karena merupakan salah satu industri yang dapat berkontribusi besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Buku juga dapat berkontribusi besar bagi kemajuan intelektual bangsa Indonesia yang dapat terus berlanjut sampai nanti, namun industri penerbitan buku ini masih memiliki banyak hambatan. Seperti kurangnya upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta intelektual penulis, banyak buku-buku bajakan yang beredar, bahan baku kertas yang semakin mahal. Diharapkan

pemerintah semakin meningkatkan perannya dalam memajukan industri penerbitan buku melalui kebijakan pemerintah yang dapat membantu industri penerbitan buku mengatasi hambatan yang ada.

Sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan yang dapat mewujudkan sistem perbukuan yang sehat. Diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui penerbitan peraturan maupun Undang-Undang dapat memihak pada masyarakat. Jika peraturan mengenai perpajakan buku dan royalti dianggap menghambat terwujudnya sistem perbukuan yang sehat, maka harus ada keberpihakan dari pemerintah agar semua pihak tidak merasa dirugikan. Peraturan-peraturan yang terkait dengan pajak atas buku dan pajak atas royalti penulis, antara lain:

1. Pajak atas buku

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pada peraturan tersebut menjelaskan tentang apa saja yang termasuk ke dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), jenis barang dan jasa yang tidak kena PPN, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PPN dikenakan atas:

- 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 2) Impor BKP;

- 3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- 8) Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

Buku termasuk ke dalam kategori BKP dan harus dikenakan pajak sebesar 10%. Kecuali buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama tidak dikenakan pajak, karena termasuk ke dalam Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari PPN.

Dasar pembebasan PPN terdapat di Pasal 16B, dimana Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan fasilitas berupa PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut untuk:

- 1) Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- 2) Penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu;
- 3) Impor BKP tertentu;
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

- 5) Pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Tujuan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk buku pelajaran umum kitab suci, dan buku pelajaran agama adalah untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa agar buku-buku tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang relatif.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan ini menjelaskan bahwa buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama termasuk Barang Kena Pajak Tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.011/2013 Tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud buku-buku pelajaran umum dan buku-buku pelajaran agama yang dibebaskan dari pajak adalah buku-buku fiksi dan nonfiksi yang



ditujukan untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang, dan kepustakaan di bidang pelajaran umum atau agama. Buku-buku tersebut harus sudah disahkan oleh menteri pendidikan.

Kitab suci yang dibebaskan dari pajak adalah semua kitab suci agama yang sudah ditetapkan oleh menteri agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.

Selain ketiga kategori yang sudah ditetapkan oleh menteri tersebut, maka akan dikenakan pajak PPN. Namun, untuk buku-buku yang tidak dapat dikategorikan sebagai buku-buku pelajaran umum dan pelajaran agama, dapat disahkan sebagai kategori tersebut apabila mendapat izin dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Dengan syarat orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan buku-buku tersebut harus memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN atas impor atau penyerahan buku-buku yang tidak termasuk dalam kategori buku pelajaran umum atau agama.

## 2. Pajak atas royalti penulis

### a. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa pihak yang menerima penghasilan berupa royalti akan dikenakan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan akan dipotong serta dilaporkan kepada kantor pajak oleh pihak yang memberi penghasilan.

Pihak yang berhak memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, atau Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan pihak yang berkewajiban untuk membayar PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Tarif untuk PPh Pasal 23 atas royalti adalah sebesar 15% untuk yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak sebesar 30%.

- b. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-639/PJ.03/2017 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Pekerjaan Bebas Sebagai Penulis.

Dijelaskan bahwa Orang Pribadi yang bekerja bebas sebagai penulis yang memperoleh penghasilan dari royalti akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Penulis membayar pajaknya dalam tahun berjalan melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, dalam hal ini adalah penerbit atau penulis itu sendiri yang membayar jika menerbitkan bukunya sendiri tanpa bantuan

penerbit. Pada akhir tahun pajak, PPh Pasal 23 yang sudah dibayar dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang.

Dalam menghitung PPh Pasal 23 Penulis boleh menghitung penghasilan netonya menggunakan dua cara, yaitu:

- 1) Wajib Pajak (Penulis) memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan neto dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, baik biaya secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Wajib Pajak (Penulis) memilih untuk menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan syarat penghasilan bruto selama satu tahun kurang dari Rp 4,8 miliar, wajib melakukan pencatatan, dan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai penggunaan NPPN paling lambat tiga bulan sejak awal tahun pajak.

Sesuai dengan PER-17/PJ/2015 di lampiran I (Kegiatan Pekerja Seni KLU:90002), besaran norma penulis adalah 50%, maka cara menghitung penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikali dengan 50%.

- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Peraturan ini menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Wajib Pajak dapat menggunakan perhitungan NPPN.

Cara menghitung norma menggunakan NPPN adalah dengan cara mengalikan peredaran bruto dengan angka persentase NPPN. Besaran persentase NPPN telah tercantum di dalam lampiran I, II, dan III dan dikelompokkan kedalam tiga wilayah, yaitu wilayah 10 ibukota propinsi, ibukota propinsi lainnya, dan daerah lainnya.

- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peraturan tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pencatatan, antara lain:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas
  - 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dan memilih menggunakan NPPN.
  - 3) Penghasilan bruto yang diterima bukan berasal dari penghasilan final.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.

Peraturan ini membahas tentang pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata. Wewenang untuk menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan ada di tangan Pemerintah Pusat. Selain itu Pemerintah Pusat juga

berwenang memberikan insentif fiskal untuk kepentingan pengembangan perbukuan.

Terdapat beberapa poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan ini, yaitu terjaminnya ketersediaan buku pendidikan dan buku umum yang bermutu, murah, dan merata, kemudahan mendapat layanan akses buku secara merata di seluruh daerah, perlindungan dan kepastian hukum untuk seluruh pelaku perbukuan, menjamin terlaksananya program untuk meningkatkan minat baca dan minat menulis, serta peran masyarakat untuk ikut dalam menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.

Undang-Undang Sistem perbukuan ini juga mencantumkan bahwa penulis berhak untuk memiliki hak cipta atas naskah tulisannya dan hak cipta karya mereka akan terlindungi. Sehingga diharapkan para penulis lebih bergairah untuk menulis.

#### **4.3. Fasilitas PPN Dibebaskan atau PPN Tidak Dipungut**

Pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi memiliki wewenang untuk memberikan fasilitas PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut. Fasilitas ini merupakan kemudahan yang diberikan untuk memacu para pelaku ekonomi agar lebih tertarik dan giat dalam melakukan bisnis di dunia usaha. Sedangkan untuk konsumen, fasilitas diberikan agar konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

Fasilitas PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut memiliki makna yang berbeda, walaupun hakikatnya sama yaitu pembeli tidak perlu membayar PPN terutang dan bagi pengusaha tidak perlu memungut PPN yang terutang. Berdasarkan Pasal 16 B Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, terdapat perbedaan di antara kedua fasilitas PPN tersebut, yaitu:

1. Fasilitas PPN dibebaskan
  - a. Penyerahan BKP atau JKP dibebaskan atau digratiskan dari pengenaan PPN
  - b. Pajak masukan yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP tidak boleh dikreditkan, sehingga pajak masukannya dibebankan pada harga pokok penjualan.
  - c. Tidak ada pajak keluaran yang dipungut dari konsumen
  - d. Pengusaha tidak menerbitkan Faktur Pajak
2. Fasilitas pajak tidak dipungut
  - a. Fasilitas yang diberikan atas penyerahan BKP atau JKP yang PPN nya tidak perlu dipungut oleh penjual
  - b. Pajak masukan yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP boleh dikreditkan
  - c. Ada pajak keluaran tetapi tidak dipungut
  - d. Pengusaha tetap menerbitkan faktur pajak

Sebaiknya pemberian fasilitas disesuaikan dengan tujuan kegiatan ekonomi suatu usaha. Fasilitas PPN tidak dipungut cocok untuk kegiatan ekonomi yang menjadi prioritas nasional, seperti gedung sekolah, jembatan, dan lain-lain atau



untuk barang/jasa tertentu yang merupakan kebutuhan hidup orang banyak yang berada pada bagian dari mata rantai produksi dan distribusi, seperti seragam sekolah, obat, dan lain-lain. Sedangkan, fasilitas PPN dibebaskan lebih cocok untuk pembelian barang/jasa yang digunakan untuk konsumsi, bukan sebagai bahan baku atau alat produksi. Fasilitas PPN dibebaskan bisa juga untuk barang yang dihasilkan pada bagian awal dari mata rantai produksi dan distribusi dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan dalam pembebanan pajak.

#### **4.3.1. Fasilitas PPN Dibebaskan untuk Buku**

Sesuai dengan PMK No. 122/PMK.011/2013, Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk pembelian buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Tujuan diberikan fasilitas adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Indonesia melalui penyediaan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau. Diharapkan dengan harga buku yang semakin murah, minat membaca dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap buku semakin meningkat. Fasilitas pembebasan PPN diberikan kepada konsumen akhir, bisa berupa distributor, retail, ataupun pembeli yang membeli buku sesuai dengan kategori yang tertera dalam Nomor 122/PMK.011/2013. Para konsumen akan digratiskan dari pembayaran pajak untuk buku-buku yang sudah disahkan oleh Menteri Pendidikan, namun jika ingin mengajukan pembebasan PPN buku selain dalam kategori tersebut maka harus meminta rekomendasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Menurut Chairani dan Rosdiana (2014), pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk buku lebih dipilih dari pada fasilitas tidak dipungut dikarenakan dapat

menguntungkan untuk konsumen, produsen, distributor, dan Negara. Administrasinya juga tidak rumit, karena produsen tidak perlu melakukan restitusi pajak masukan yang dapat dikreditkan. Jika menggunakan fasilitas PPN tidak dipungut, pengorbanan pemerintah akan lebih besar, karena ada restitusi dan ada kemungkinan terjadi kasus *equal treatment*, dimana mata rantai sebelumnya juga akan meminta fasilitas tidak dipungut. Sesuai dengan tujuan pemerintah, fasilitas pembebasan PPN untuk buku memang ditujukan untuk meringankan beban konsumen agar tingkat konsumsi buku semakin meningkat, meskipun produsen jadi dirugikan karena labanya berkurang. Hal ini dikarenakan di dalam fasilitas pembebasan PPN, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, sehingga pajak masukan dibebankan ke dalam Harga Pokok Penjualan.

#### 4.3.2. Ilustrasi Penerapan PPN atas Buku

**Tabel 4.3.2.**

Ilustrasi Penerapan PPN atas Buku

	Tanpa Fasilitas	Fasilitas Dibebaskan
Biaya-biaya yang berkaitan dengan penyerahan 1 buku	Rp 100.000.	Rp 100.000
Pajak Masukan atas biaya-biaya	$10\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 10.000$	$10\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 10.000$
Harga Pokok Penjualan	Rp 100.000	Rp 110.000
Harga penjualan 1 buku	Rp 150.000	Rp 150.000
PPN atas penyerahan buku	$10\% \times \text{Rp } 150.000 = \text{Rp } 15.000$	Rp 0
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 10.000	Rp 0
Harga yang harus dibayar konsumen	$\text{Rp } 150.000 + \text{Rp } 15.000 = \text{Rp } 165.000$	Rp 150.000
Laba Perusahaan dari 1 buku	$\text{Rp } 150.000 - \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 50.000$	$\text{Rp } 150.000 - \text{Rp } 110.000 = \text{Rp } 40.000$

	Tanpa Fasilitas	Fasilitas Dibebaskan
PPN yang disetor ke Negara per buku	$10\% \times \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 5.000$	Rp 0

Sumber: diolah peneliti, 2018

Berdasarkan ilustrasi di atas, Fasilitas dibebaskan lebih menguntungkan konsumen buku karena tidak perlu membayar PPN sebesar 10% untuk pembelian buku, harga buku menjadi lebih murah dibandingkan tidak menggunakan fasilitas. Produsen atau pengusaha justru mendapat laba yang kecil jika menggunakan fasilitas PPN dibebaskan, karena pajak masukan tidak dapat dikreditkan sehingga harus dibebankan pada Harga Pokok Penjualan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Keuntungannya bagi produsen adalah tidak perlu melakukan administrasi untuk melakukan restitusi.

Penerapan PPN tanpa fasilitas hanya akan menguntungkan perusahaan dan merugikan konsumen. Konsumen merasa rugi, karena harus menanggung PPN sebesar 10% untuk pembelian buku dan perusahaan mendapat untung karena pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang berkaitan dengan penyerahan buku dapat dikreditkan.

#### **4.4. Analisis Pemungutan PPN atas Buku dan PPh Pasal 23 atas Royalti**

##### **Ditinjau dari Asas Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak yang baik adalah sistem yang memperhatikan asas-asas saat memungut pajak dan memperhatikan semua kepentingan. Asas-asas tersebut antara lain:

##### **4.4.1. Asas Equity**

Pemungutan pajak yang baik harus memperhatikan asas *equity*. Asas *equity* atau asas keadilan merupakan salah satu asas yang sering menjadi pertimbangan

penting bagi Pemerintah dalam membangun sistem perpajakan atau membuat suatu kebijakan perpajakan. Asas ini sering dijadikan acuan sebagai pembanding peraturan perpajakan yang sudah ada. Asas *equity* menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak-pihak yang terlibat. Wajib Pajak harus menerima manfaat yang sebanding dengan pajak yang sudah dibayar. Asas keadilan dalam pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Keadilan Horizontal

Pajak dikenakan secara sama pada setiap Wajib Pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan jenis penghasilannya. Asas ini sudah terpenuhi dalam PPh Pasal 23 atas royalti maupun PPN atas buku, dimana semua penulis yang mendapatkan penghasilan berupa royalti akan langsung dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau penerbit. Begitu juga dengan pembelian buku, konsumen akan langsung dikenakan PPN sebesar 10% dari harga jual.

2. Keadilan Vertikal

Wajib Pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih akan membayar pajak lebih tinggi juga. Pemungutan pajak harus dikenakan sesuai dengan penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Ditinjau dari perspektif asas keadilan vertikal maka sesungguhnya pengenaan pajak untuk penulis sudah selaras dengan Undang-Undang. Penulis yang

memiliki penghasilan semakin besar maka akan dikenakan pajak yang semakin tinggi, karena dalam perhitungan PPh Pasal 23 atas royalti, selain dikenakan tarif tetap sebesar 15% nantinya pajak terutang penulis akan dihitung kembali menggunakan tarif progresif yang berarti tarif berdasarkan lapisan penghasilan. Begitupun dengan buku, kemampuan ekonomis konsumen dapat dilihat dari harga buku yang dibeli, semakin tinggi daya beli konsumen maka otomatis pajak yang harus dibayar juga tinggi.

Berkaitan dengan asas keadilan horizontal dan vertikal, pemungutan pajak atas buku sudah memenuhi kedua asas tersebut, tetapi banyak pihak-pihak yang terlibat merasa tidak adil dengan tarif pajak yang dikenakan, karena buku dikenakan pajak yang berlapis, mulai dari proses pemberian naskah oleh penulis sampai pembelian buku oleh konsumen. Terdapat dua aspek perpajakan yang terkait dalam buku yaitu:

1. PPh Pasal 23 atas royalti

Penulis yang mendapatkan penghasilan berupa royalti akan dikenakan pajak PPh Pasal 23 sebesar 15% bagi yang memiliki NPWP dan bagi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan sebesar 30%. Biasanya besaran royalti didapat dari penerbit berkisar antara 8%-10%.

2. PPN buku

Konsumen wajib membayar PPN sebesar 10% ketika membeli buku yang merupakan objek BKP. Kecuali untuk kategori buku

pelajaran umum, kitab suci, pelajaran agama, dan buku yang sudah disahkan oleh Menteri Pendidikan untuk dibebaskan dari PPN.

Peneliti menganalisis asas-asas pemungutan pajak atas buku dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada ahli pajak, penulis, dan konsumen buku. Terdapat pendapat pro dan kontra dari narasumber terhadap pengenaan pajak, baik pengenaan PPh Pasal 23 atas royalti maupun PPN buku.

Berdasarkan wawancara dengan Setyo Tri Wahyudi selaku penulis buku adalah penulis merasa pendapatan mereka sangat kecil sekali, karena penulis hanya mendapatkan royalti 10% belum lagi dikenakan pajak 15%, seperti yang dikutip di bawah ini:

“Iya jadi ini yang menjadi permasalahan beberapa waktu lalu mengenai pajak penulis royalti itu ternyata sudah nilainya kecil dikenakan pajak lagi. Teman-teman penulis lain mengatakan kalau penulis ini sudah dieksploitasi waktunya, ketika dapat royalti kecil kena pajak lagi. Ibaratnya kita itu jadi tidak dapat apa-apa”

Beliau memberikan solusi sebaiknya pajak ditiadakan atau tetap dikenakan pajak ketika penjualan buku sudah mencapai batasan yang sudah ditentukan.

“Ya sebetulnya kalau melihat kondisi pajak penulis yang relatif besar sebesar 15%, itu menurut kami ya lebih baik pajak itu ditiadakan. Harusnya pajak itu dihitung ketika pendapatan untuk buku sudah mencapai sekian. Misalkan buku yang terjual minimal 10.000 eksemplar baru kena pajak. Dibawah 10.000 eksemplar penjualan buku, maka dia belum kena pajak”

Berbeda dengan Mashdar Zainal selaku penulis buku yang merasa tidak keberatan dengan tarif pajak atas royalti sebesar 15%. Beliau hanya menginginkan penulis mendapatkan honor yang layak.

“Saya nyaris tak pernah merasa keberatan, tapi sebagai penulis tentu akan lebih senang apabila profesi penulis ini lebih dihargai”



Pendapat kontra mengenai masalah pajak tidak hanya dari penulis saja, konsumen buku juga merasa keberatan dengan adanya pemungutan PPN pada buku-buku yang dikecualikan dari objek fasilitas pembebasan PPN. Padahal hampir semua buku juga memiliki isi yang bermanfaat untuk mencerdaskan bangsa, sebagaimana hasil wawancara dengan Indriati Nurul sebagai berikut:

“Menurut saya supaya harga buku tidak terlalu mahal, sebaiknya pajak 10% tidak perlu dikenakan pada buku, supaya minat membeli buku orang-orang Indonesia tuh semakin besar. Akhirnya minat bacanya pun semakin meningkat, akhirnya semakin banyak yang membaca.”

Hal ini sejalan dengan pendapat Hendi Subandi yang menyatakan bahwa sebaiknya buku dibebaskan dari PPN, namun mekanisme industri buku juga harus diperbaiki agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak tapi harga buku tetap dijual mahal, seperti yang dikutip di bawah ini:

“...Kalau saya sih berharapnya dibebaskan, tapi mekanisme ini bagaimana agar jangan sampai ketika buku sudah dibebaskan PPN-nya harga tetap masih mahal, kan percuma. Jadi malah ketika itu dikeruklah untungnya makin banyak, porsi komposisi keuntungannya malah makin melebar bagi penerbit dan juga mungkin bagi toko buku.”

Peneliti juga beranggapan bahwa perlu adanya pengkajian ulang mengenai pengenaan pajak pada royalti penulis dan pajak pembelian buku. Penurunan tarif pajak atas royalti dan pembebasan PPN atas buku harus dilaksanakan agar semua pihak merasa adil, namun juga harus dilakukan pengkajian ulang dalam mekanisme industri buku agar porsi keuntungan setiap pihak yang terlibat dalam industri tersebut dapat dibagi secara adil. Pemerintah juga harus mengawasi mekanisme industri buku, jangan sampai ketika tarif pajak atas royalti sudah diturunkan dan buku sudah dibebaskan pajaknya, harga buku yang beredar di

masyarakat masih dijual dengan harga mahal, akibat dari pihak-pihak nakal yang mencari porsi keuntungan yang besar.

Peneliti berpendapat jika pajak atas royalti akan sulit jika dibebaskan pemungutannya, persentase pajak royalti hanya bisa diturunkan, karena sudah kewajiban seorang yang memiliki penghasilan untuk dikenakan pajak. Perlu adanya batasan-batasan bagi jumlah pendapatan penulis, baru dikenakan pajak. Hal ini dilakukan agar penulis yang mendapatkan penghasilan lebih besar dikenakan pajak yang tinggi juga, begitupun sebaliknya.

Selanjutnya terdapat dua macam prinsip asas keadilan yang berkaitan dengan pemungutan pajak, yaitu:

1. *Benefit Principle*

Prinsip ini menekankan bahwa sistem perpajakan dapat dikatakan adil jika setiap Wajib Pajak menerima manfaat dari Pemerintah sesuai dengan pajak yang dibayar. Manfaat yang diterima Wajib Pajak bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

Seharusnya dalam praktek pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti atau PPN atas buku, Wajib Pajak akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Para penulis dan konsumen berharap dengan membayar pajak mereka akan mendapatkan manfaat, seperti keberpihakan Pemerintah kepada mereka dengan memberikan insentif untuk mendorong minat, namun mereka tidak merasakan hal tersebut, seperti pendapat dari Setyo Tri Wahyudi:

“Kalau perlu tidak hanya pajak yang dikenakan oleh pemerintah, pemerintah juga perlu insentif dong. Kalau anda bisa menerbitkan

buku dalam satu tahun dua atau tiga buku, oke anda akan dikenai pajak 15%, tapi anda kami beri insentif lebih besar dari pajaknya misalkan. Nah itu kita tambah seneng, sehingga jangan hanya narik saja, tapi apa sih kontribusi dari pemerintah dalam membuat penulis itu tetap senang menulis.”

Putri Nabila sebagai Konsumen buku juga mengatakan pendapat yang sama:

“Pajak cuma membuat buku menjadi mahal saja, jika masih dipajaki upaya pemerintah untuk menjadikan buku menjadi murah akan sulit tercapai. Saya berharap Pemerintah lebih peduli kepada buku, dengan memberikan insentif kepada penjualan buku dan membebaskan semua buku saja untuk mendorong minat baca masyarakat”

Seharusnya dengan adanya pajak, Pemerintah memberikan perlindungan yang lebih kepada hak cipta para penulis dan melakukan pengawasan terhadap pembajakan buku untuk mendorong minat menulis. Selain itu pemerintah juga harus mengawasi mekanisme industri buku agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan yang banyak, sehingga harga buku tidak menjadi terlalu mahal.

## 2. *Ability To Pay Principle*

Prinsip ini menekankan bahwa pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan masing-masing Wajib Pajak dalam membayar pajak. Konsep ini dalam pajak pada buku lebih tepat ditujukan kepada kemampuan masing-masing penulis buku maupun konsumen. Pada awalnya, para penulis akan langsung dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% oleh penerbit, tanpa melihat kemampuan ekonomis mereka. Para penulis baru menerima royalti saat satu semester sekali, itu pun pendapatan mereka tidak tentu, penjualan buku

mereka kadang bisa tinggi ataupun rendah. Oleh karena itu para penulis merasa terbebani dengan adanya pajak atas royalti. Berbeda dengan buku yang pajaknya menyesuaikan dengan kemampuan ekonomis mereka dilihat dari daya konsumsi, namun dengan adanya PPN atas buku, para konsumen buku yang memiliki penghasilan tidak terlalu banyak akan merasa terbebani dengan adanya PPN atas buku. Apabila dikaitkan dengan pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti dan PPN buku maka dalam pungutannya harus memperhatikan kemampuan penulis dan konsumen.

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa penulis dan konsumen merasa tidak adil dengan pengenaan pajak yang dilakukan. Penulis merasa pajak hanya akan mengurangi pendapatan mereka yang sudah sangat sedikit. Konsumen juga menyatakan tidak adil terhadap pengenaan PPN. Konsumen merasa bahwa pajak menyebabkan harga buku menjadi mahal dan dapat mempengaruhi kemampuan membeli. Oleh karena itu konsumen ingin semua kategori buku dibebaskan dari pengenaan pajak agar daya beli mereka meningkat dan berpengaruh terhadap minat baca masyarakat yang juga ikut meningkat.

#### **4.4.2. Asas Revenue Productivity**

Asas *revenue productivity* atau asas produktivitas penerimaan merupakan asas yang lebih mengutamakan kepentingan Pemerintah dalam membuat kebijakan pajak. Berbeda dengan asas equity yang lebih memihak kepada masyarakat. Asas *revenue productivity* lebih menekankan kepada upaya Pemerintah dalam memperoleh pendapatan. Sistem pemungutan pajak seharusnya

dapat menjamin penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pengeluaran negara. Sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair*, dimana pajak dikenakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Meskipun asas ini lebih mementingkan kepentingan Pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang memadai, namun dalam implementasinya pemungutan pajak juga harus dapat memenuhi asas keadilan untuk Pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan negaranya, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak. Pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara setiap tahunnya. Tabel berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi penerimaan negara pada tahun 2017.

**Tabel 4.4.2.**

Penerimaan Negara Tahun 2017 (dalam triliun rupiah)

SUMBER PENERIMAAN	Tahun 2017
<b>Penerimaan dalam Negeri:</b>	<b>1.648,2</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	
<b>1. Pajak dalam Negeri:</b>	<b>1.339,8</b>
- Pajak Penghasilan	645,6
- Pajak Pertambahan Nilai	478,4
- Pajak Bumi dan Bangunan	16,8
- Cukai	192,3
- Pajak Lainnya	6,7
<b>2. Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>308,2</b>
- Penerimaan Sumber Daya Alam	110,9
- Bagian laba BUMN	43,9
- Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	108,7
- Pendapatan Badan Layanan Umum	44,7
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>7,6</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.655,6</b>

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diolah peneliti, 2018

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak juga dapat dilihat dari fenomena yang terjadi, bahwa pengenaan tarif pajak di Indonesia termasuk salah satu yang tinggi dari negara Asia lainnya. Oleh karena itu perlu pengkajian ulang mengenai pengenaan tarif pajak, agar tidak terlalu memberatkan masyarakat dan tetap memperhatikan asas keadilan, namun tetap dapat menambah pendapatan negara. Selain berupaya untuk mengumpulkan pendapatan negara, pemerintah juga memberikan fasilitas kepada masyarakat, salah satunya adalah fasilitas pembebasan PPN. pemberian fasilitas bertujuan untuk meningkatkan tingkat konsumsi dari konsumen.

Pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk buku memang akan mengurangi pendapatan Pemerintah dari penerimaan PPN, namun sesuai dengan penjelasan UU No 42 Tahun 2009 Pasal 16B, tujuan Pemerintah dalam memberikan fasilitas pembebasan adalah untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan bangsa, sehingga diharapkan pada beberapa tahun ke depan dengan masyarakat yang semakin cerdas, maka semakin banyak masyarakat yang berpenghasilan. Selain dari PPN, Pemerintah bisa mendapatkan penghasilan pajak lainnya dari PPh, oleh karena itu tidak mungkin jika PPh penulis ikut dibebaskan juga karena dapat mengurangi pendapatan negara yang sebagian besar didapat dari penerimaan PPh.



#### 4.4.3. Asas Ease of Administration

Terdapat empat unsur yang termasuk ke dalam asas *ease of administration*, antara lain:

##### 1. Asas *Certainty*

Asas *certainty* atau asas kepastian adalah asas yang menyatakan bahwa dalam setiap ketentuan pemungutan perpajakan harus ada kepastian yang jelas antara Wajib Pajak dan petugas pajak. Kepastian peraturan pemungutan pajak setidaknya harus mencakup subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif yang dikenakan, dan prosedur pengenaan pajak. Peraturan perpajakan yang jelas bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada setiap orang untuk mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu peraturan dan prosedur yang jelas dalam memungut pajak dapat membantu petugas pajak untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Peneliti akan menganalisis pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti menggunakan asas *certainty*, yaitu:

- a. Subjek pajak, dalam pemungutan pajak harus pasti siapa saja yang harus dikenakan pajak. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 salah satu yang menjadi subjek pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri baik badan atau orang pribadi yang menerima atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Penulis termasuk salah satu

subjek PPh Pasal 23 dikarenakan merupakan orang pribadi yang menerima penghasilan berupa royalti

- b. Objek Pajak PPh Pasal 23 adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, dan imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa konsultan.
- c. Dasar Pengenaan Pajak penulis dikenakan atas pendapatan yang diterima yaitu berupa royalti.
- d. Tarif pajak penulis dikenakan sebesar 15% dari jumlah royalti yang di dapat dan bersifat tidak final. Sehingga penulis boleh melakukan restitusi jika ada lebih bayar dengan memberikan bukti potong dari penerbit. Penulis yang pendapatannya kurang dari Rp 4,8 miliar boleh menghitung pajaknya dengan pilihan potongan norma sebesar 50%.
- e. Prosedur pengenaan pajak penulis yang pertama adalah penulis yang mendapatkan royalti akan langsung dipotong pajaknya sebesar 15% oleh penerbit. Pajak yang telah dipotong pada akhir tahun dapat menjadi pengurang pajak terutang. Selanjutnya penerbit akan memberikan bukti potong kepada penulis. Pada akhir tahun pajak jika terdapat lebih bayar, maka penulis dapat mengambil kelebihannya dengan syarat dapat menunjukkan bukti potong dari penerbit.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPh Pasal 23 sudah memenuhi semua unsur yang ada di dalam asas

*certainty*, namun berdasarkan wawancara dengan penulis, ternyata para penulis tidak pernah mengetahui prosedur pengenaan pajak, mereka hanya mengetahui rincian mengenai pendapatan bersih mereka setelah dipotong, tetapi mereka tidak pernah menerima bukti potong dari penerbit. Oleh karena itu mereka tidak pernah melakukan restitusi..

Seperti pendapat dari Setyo Tri Wahyudi yang menyatakan bahwa:

“...royalti harusnya saya juga dapatkan itu (bukti potong) tapi selama ini kayaknya penerbit hanya memberikan informasi mengenai berapa royalti yang sudah dibayarkan kepada saya, bagaimana menghitungnya. Namun untuk SPT potongnya sampai hari ini saya belum dapat, tapi laporan berapa terjual, berapa royalti yang saya dapat itu saya peroleh. Saya nggak tahu nilai itu sudah dipotong pajak atau belum gitu ya”

Penulis buku Mashdar Zainal juga berpendapat yang sama, beliau tidak mengetahui mengenai ketentuan pemungutan pajak, seperti hasil wawancara yang dikutip di bawah ini:

“Saya tak tahu banyak, sebab saya tidak terlalu mempermasalahkan soal pajak, bahkan beberapa penulis pemula (seperti saya), buku di-acc penerbit saja sudah senang”

Beliau juga tidak pernah melakukan restitusi, karena ketidakpahaman mengenai prosedur restitusi kepada kantor pajak.

“Tidak pernah. Sebab saya tak begitu paham. Dan, selain itu saya kira itu cukup menyita waktu.”

Dari pendapat beberapa narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman literasi pajak para penulis masih rendah, padahal jika mereka paham betul dengan prosedur pemungutan PPh atas royalti penulis maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Seperti prosedur restitusi kepada kantor pajak, para penulis tidak

mengetahui prosedur restitusi yang benar, sehingga mereka tidak pernah meminta kelebihan pajak yang sudah dibayar oleh mereka.

Sedangkan untuk pengenaan PPN buku yang ditinjau dari asas *certainty*, yaitu:

- a. Subjek pajak dibagi menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP, JKP, dan yang melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP serta Non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.
- b. Objek Pajak menurut UU No 42 Tahun 2009 adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). BKP adalah barang berwujud yang dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan suatu barang atau fasilitas tersedia untuk dipakai. Buku termasuk ke dalam BKP sehingga dikenakan pajak, kecuali buku pelajaran umum, kitab suci, dan pelajaran agama termasuk ke dalam objek BKP tertentu yang dibebaskan dari PPN.
- c. Dasar Pengenaan Pajak PPN buku adalah harga jual buku.

- d. Tarif PPN buku dikenakan sebesar 10% dari harga jual untuk buku-buku yang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Buku-buku yang mendapatkan fasilitas hanya buku yang masuk ke dalam kategori buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran umum.
- e. Prosedur pengenaan PPN dikenakan secara langsung kepada konsumen ketika membeli buku. Pada saat membeli buku, konsumen akan membayar harga barang yang sudah termasuk PPN. Setelah membayar, konsumen akan menerima bukti potong atau faktur pajak berupa nota.

Ketentuan pemungutan PPN juga sudah memenuhi unsur-unsur dalam asas *certainty*, namun konsumen buku menganggap pengenaan PPN pada buku belum jelas. Seperti yang dikatakan Putri Nabila sebagai konsumen buku, sebagai berikut:

“Menurut saya belum ya. Setiap beli buku tidak ada tulisan secara gamblang kalau buku dikenakan pajak sebesar 10%. Konsumen juga tidak tahu menahu mana saja buku yang dikenakan pajak, mana yang dibebaskan. Kan beda nggak seperti kalau kita pergi ke restoran gitu, di notanya pasti ada tulisan dikenakan pajak 10%.”

Setiap ketentuan pemungutan perpajakan harus tegas, jelas, dan menjamin kepastian bagi setiap Wajib Pajak agar mudah dimengerti dan juga memudahkan administrasi perpajakan. Petugas pajak harus melakukan sosialisasi secara intens mengenai pemungutan pajak kepada Wajib Pajak, agar wajib Pajak dapat mengetahui hak, kewajiban, dan prosedur pajak.

## 2. Asas *Convenience of Payment*

Asas *convenience of payment* atau asas kenyamanan menyatakan bahwa pemungutan pajak yang baik dilakukan pada saat yang tepat. Saat yang tepat adalah saat Wajib Pajak sedang dalam keadaan yang nyaman untuk membayar pajak, misalnya saat sedang menerima penghasilan. Setiap Wajib Pajak memiliki saat kenyamanan yang berbeda-beda. Seseorang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap seperti karyawan, akan lebih mudah untuk membayar pajak pada saat menerima penghasilan. Lain halnya dengan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tidak tetap, seperti penulis yang merupakan pekerja bebas, mereka baru mendapatkan penghasilan atau royalti jika menerbitkan buku, dimana royalti akan dibayarkan enam bulan sekali dalam setahun. Penulis bisa sukses atau gagal, penghasilannya pun tidak menentu, tergantung dengan buku yang dijual laku atau tidak di pasaran. Hal ini yang dapat memberatkan penulis.

Berbeda dengan pengenaan PPN untuk buku bagi konsumen. Asas *convenience* akan sulit diukur jika hanya melihat kapan seseorang tersebut menerima penghasilan, karena PPN dikenakan pada saat konsumen buku tersebut membeli buku. Saat yang tepat Wajib Pajak untuk membayar pajak bagi konsumen bisa dilihat dari pengeluarannya, semakin banyak melakukan pengeluaran, maka dianggap seseorang tersebut mampu membayar pajak. Konsumen buku akan dikenakan



PPN yang semakin tinggi sesuai dengan semakin tinggi harga buku yang dibelinya.

### 3. Asas *Efficiency*

Sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk membayar pajak dapat ditekan seminimal mungkin. Asas *efficiency* ditentukan dengan menggunakan analisis *cost of taxation*, jika *cost of taxation*-nya rendah maka pemungutan pajak dikatakan efisien. *Cost of taxation* adalah beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Terdapat tiga komponen dalam menganalisis *cost of taxation*, yaitu *sacrifice of income*, *distortion cost*, dan *compliance cost*.

*Sacrifice of income* adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak. Penulis sebagai Wajib Pajak juga menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak, padahal penulis juga membutuhkan modal yang besar untuk menerbitkan buku. Apabila penulis dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan kemampuannya maka penulis akan kesulitan dalam menerbitkan buku, karena menyisihkan penghasilannya yang seharusnya bisa untuk menambah modal kerja untuk digunakan membayar pajak. Konsumen buku juga harus menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak, dengan adanya PPN buku maka konsumen buku akan menyisihkan uangnya lebih banyak untuk membeli buku yang kena pajak, daripada buku yang dibebaskan PPN.

*Distortion cost* adalah biaya pemungutan pajak yang berhubungan dengan proses produksi suatu entitas bisnis. Pemungutan pajak dapat mempengaruhi suatu entitas bisnis untuk mengubah strategi manajemen, seperti perubahan harga, perubahan strategi pemasaran, dan lain-lain. Hal ini tidak berlaku untuk penulis maupun konsumen buku, karena bukan sebagai suatu entitas bisnis.

*Compliance cost* adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya untuk jasa konsultan pajak, biaya transportasi pengurusan pajak, biaya pencetakan, dan lain-lain. Selain itu terdapat biaya berupa waktu yang diluangkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, seperti waktu untuk mengisi formulir, waktu untuk mengisi SPT, waktu untuk melakukan restitusi, dan lain-lain.

#### 4. Asas *Simplicity*

Asas *simplicity* atau asas kesederhanaan adalah asas yang lebih menekankan kepada kesederhanaan dan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak, agar dapat lebih mudah dimengerti sehingga Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam membayar. Pemerintah sudah memberikan kemudahan menghitung dalam sistem pemungutan PPh. Sesuai dengan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dibawah Rp 4,8 miliar diberikan kemudahan untuk menghitung menggunakan NPPN dan wajib melakukan pencatatan. Kemudahan ini diberikan bagi Wajib

Pajak yang kesulitan dalam melaksanakan pembukuan. Pemungutan PPN untuk buku juga memenuhi asas kesederhanaan, karena menggunakan *flat rate* sebesar 15% bagi semua konsumen buku. *Flat rate* dapat dikatakan sederhana karena perhitungannya yang tidak rumit tanpa memperhatikan lapisan penghasilan kena pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Hendi Subandi, ternyata pengenaan PPh Pasal 23 atas royalti dirasa masih rumit.

“...mekanisme ini sepertinya harus dilakukan penyederhanaan, walaupun kalau menurut saya masih sederhana, cuma bagi orang awam masih kompleks harus menghitung norma dan segala macam”

Sosialisasi pajak diperlukan bagi Wajib Pajak untuk mengetahui cara menghitung dan pemungutan pajak agar lebih jelas dan mudah dimengerti.

#### **4.4.4. Asas *Neutrality***

Pajak tidak boleh menimbulkan distorsi dalam ekonomi suatu negara, harus bersifat netral. Artinya adalah pajak tidak boleh mempengaruhi keputusan masyarakat untuk konsumsi dan juga tidak mempengaruhi keputusan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Pajak untuk royalti penulis tidak boleh mempengaruhi keputusan penulis untuk menerbitkan buku, tidak boleh mengurangi minat penulis dalam menghasilkan buku. Begitu juga dengan PPN buku tidak boleh mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Pemerintah harus memberikan insentif perpajakan yang adil dan tidak boleh menaikkan tarif pajak terlalu tinggi, sehingga menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam membayar pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Setyo Tri Wahyudi selaku dosen dan penulis buku, pajak tidak berpengaruh terhadap minat menulisnya, seperti kutipan berikut:

“...Sehingga penulis itu sebenarnya bukan lagi mengejar materinya, tapi dia mengejar prestige bahwa tulisan itu bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga dengan alasan itu dengan kondisi apapun ya, dipajaki ataupun tidak dipajaki, royalti besar atau kecil, penulis akan tetap menulis, karena apa? karena mereka sebetulnya bukan mengejar sisi materinya...”

Penulis buku menganggap bahwa pemungutan pajak tidak mempengaruhi minat mereka dalam menulis, karena tujuan utama para penulis untuk menulis buku bukan hanya mencari materi namun juga kepuasan tersendiri ketika buku yang diterbitkan dapat dibaca oleh banyak orang. Oleh karena minat menulis para penulis yang tinggi maka jumlah angka penerbitan buku selalu menunjukkan peningkatan. Pemerintah hanya perlu meningkatkan keberpihakannya terhadap penulis dengan memberikan insentif agar minat menulis semakin meningkat, jangan sampai karena minat menulis yang sudah tinggi maka pemerintah sudah tidak peduli lagi dengan para penulis.

Berbanding terbalik dengan angka penjualan buku yang semakin turun, salah satu penyebabnya dikarenakan mahalnnya harga buku yang beredar di pasaran akibat adanya pengenaan PPN. Hal ini memberatkan para konsumen ketika ingin membeli buku, dikarenakan harga buku menjadi mahal, sehingga daya beli para konsumen menjadi menurun dan berdampak pada minat membaca masyarakat Indonesia. Seperti hasil wawancara dari Putri Nabila sebagai konsumen buku yang mengatakan bahwa:

“Iya, dulu waktu harga buku masih belum terlalu mahal seperti sekarang, saya sering beli buku jadinya sering baca buku juga. Tapi sekarang udah lumayan nggak sesering dulu lagi buat baca buku, soalnya harganya jadi mahal banget.

Sekarang satu novel aja bisa sampai Rp 100.000 lebih padahal ya tipis. Padahal novel itu jadi hiburan buat saya.”

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan PMK No. 122 tahun 2013 mengenai pembebasan fasilitas pembebasan PPN atas buku. Sebaiknya pemberian fasilitas pembebasan PPN diberikan kepada semua kategori buku, tidak hanya kategori buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama saja. Sehingga diharapkan nantinya buku bisa menjadi murah dan bermutu serta bisa tersebar di seluruh Indonesia.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan dan diolah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fasilitas pembebasan PPN untuk semua kategori buku lebih menguntungkan baik bagi konsumen, karena harga buku menjadi lebih murah dibandingkan tidak menggunakan fasilitas. Produsen juga akan mendapatkan keuntungan karena tidak perlu melakukan administrasi untuk melakukan restitusi.
2. Analisis pemungutan pajak PPh Pasal 23 atas royalti penulis dan PPN buku jika dilihat dari aspek perpajakan, yaitu:
  - a. Penulis dan Konsumen buku merasa tarif pajak yang dikenakan tidak memenuhi asas *equity* atau keadilan, dikarenakan tarif yang dikenakan terlalu tinggi dan memberatkan para Wajib Pajak. Penulis merasa tidak adil karena dikenakan pajak tidak sesuai dengan kemampuan mereka dalam membayar pajak. Awalnya, royalti para penulis langsung dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% oleh penerbit, tanpa melihat kemampuan ekonomis mereka. Hal ini yang membuat para penulis merasa pendapatan mereka setelah dipotong pajak sangat kecil. Hal ini tidak sesuai dengan aspek *ability to pay*. Berbeda dengan pemungutan PPN atas buku, kemampuan ekonomis konsumen dapat dilihat dari banyaknya konsumsi, namun konsumen



tetap merasa tidak adil karena fasilitas pembebasan PPN tidak diberikan pada semua kategori buku.

- b. Asas *revenue productivity* lebih mementingkan kepentingan Pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang memadai, namun juga harus dapat memenuhi asas keadilan untuk Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak boleh terlalu mementingkan untuk mendapatkan penerimaan yang tinggi sehingga pajak yang dikenakan juga tinggi. Seperti dalam kasus pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk buku, Pemerintah harus mengorbankan kepentingannya untuk mendapatkan penerimaan negara demi kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas *ease of administration* terdiri dari empat unsur, yaitu:
  - 1) Menurut asas *certainty*, peraturan perpajakan terkait subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif yang dikenakan, dan prosedur pengenaan pajak harus jelas agar Wajib Pajak dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan benar. Berdasarkan analisis, pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN buku sudah memenuhi asas *certainty*, namun masih banyak Wajib Pajak yang tidak terlalu memperhatikan ketentuan perpajakan sehingga masih banyak yang bingung dalam pelaksanaannya.
  - 2) Pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis tidak memenuhi asas *convenience of payment*, karena dikenakan tarif yang sama bagi semua penulis tanpa melihat penghasilan yang diterima,

padahal penulis menerima penghasilan yang tidak tetap. Berbeda dengan konsumen buku yang sudah memenuhi asas *convenience of payment*, karena dikenakan sesuai dengan tingkat konsumsi.

- 3) Sistem pemungutan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dan PPN buku belum memenuhi efisien, dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam membayar pajak belum bisa ditekan seminimal mungkin.
- 4) Pengenaan PPh Pasal 23 atas royalti penulis dirasa masih rumit, tidak sesuai dengan asas *simplicity* yang lebih menekankan pada kesederhanaan pemungutan pajak. Berbeda dengan pemungutan PPN buku yang sudah sederhana, karena dikenakan tarif flat untuk semua konsumen buku.
  - a. Sesuai dengan asas *neutrality*, pengenaan tarif pajak yang tinggi tidak boleh mempengaruhi minat penulis dalam menerbitkan buku dan tidak boleh mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli buku.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari terdapat banyak hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Hal tersebut diantaranya adalah:

1. Persepsi penulis buku dan konsumen buku terhadap asas pemungutan pajak dalam penelitian ini hanya terbatas di daerah Malang, dikarenakan peneliti terkendala waktu dan biaya. Hal tersebut mengakibatkan

penelitian ini tidak dapat mencakup pendapat para narasumber secara luas.

2. Beberapa responden dalam penelitian ini masih belum sadar akan pajak dan pengetahuan mengenai pemungutan pajak masih minim. Terlebih pengetahuan mengenai Peraturan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-639/PJ.03/2017 tentang perhitungan PPh Pasal 23 atas royalti penulis yang diperbolehkan menggunakan norma masih baru diberlakukan pada tahun 2017. Sehingga dalam menjawab pertanyaan wawancara masih belum sesuai dengan peraturan pajak yang baru berlaku.

### **5.3. Saran untuk Penelitian Berikutnya**

1. Disarankan penelitian selanjutnya menggunakan lingkup yang lebih luas, seperti mencakup wawancara dari penulis luar kota Malang, toko buku, dan penerbit mengenai perspektif mereka terhadap pemungutan pajak atas buku, sehingga hasil wawancara para responden lebih luas dan merata, serta dapat dibandingkan dengan banyak responden.
2. Disarankan perlu adanya penelitian mendalam mengenai pemahaman penulis buku dan konsumen buku terhadap peraturan pajak yang berlaku. Terutama Peraturan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-639/PJ.03/2017 untuk penulis buku. Agar hasil data yang didapatkan dari wawancara dengan penulis buku dan konsumen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. 2017. “bagaimana buku dicap harga sebelum sampai ke tangan-pembaca” diakses pada 20 Februari 2018 dari <https://tirto.id/bagaimana-buku-dicap-harga-sebelum-sampai-ke-tangan-pembaca-cwNk>
- Central Connecticut State University. 2016. “World’s Most Literate Nations” diakses pada 25 Januari dari <http://www.ccsu.edu/wmln/rank.html>
- Chairani, B. F. & Rosdiana, H. (2014). *Evaluasi Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Buku* (Skripsi, Universitas Indonesia). Diakses dari <http://lontar.ui.ac.id/naskahringkas/201605/S55229Bunga%20Feria%0> Chairani
- El Haq, T.W. 2017. “Ini Curhatan Novelis Tere Liye Soal Tingginya Pajak Penulis” diakses pada tanggal 8 Februari 2018 dari <https://news.ddtc.co.id/ini-curhatan-novelis-tere-liye-soal-tingginya-pajak-penulis-10871>
- Halim, A., Ranga, B. I., & Dara A.. (2017). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Penerbit Indonesia. 2018. “Buku Indonesia dalam Angka” diakses pada tanggal 25 April 2018 dari <http://ikapi.org/2018/04/08/887/>
- International Publisher Association. 2015. “VAT/GST on Books & E-books An IPA/FEP Global Special Report” diakses pada tanggal 8 Februari 2018 dari <https://www.internationalpublishers.org/images/VAT2015.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. “APBN Kita Kinerja dan Fakta” diakses pada tanggal 3 Mei 2018 dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6890/apbn-kita-edisi-januari-2018.pdf>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L.J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2013 Tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama atas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2003 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- PWC Indonesia. 2017. "Indonesian Pocket Tax Book 2017" diakses pada tanggal 8 Februari 2018 dari <https://www.pwc.com/id/en/pocket-tax-book/english/ptb-2017>
- Rambatan, G.B. (2015). *Rencana pengembangan penerbitan nasional 2015-2019*. Jakarta: PT. Republik Solusi.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H. & Irianto, E. S.(2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Keempat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-639/PJ.03/2017 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Pekerjaan Bebas Sebagai Penulis.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 ayat (2) Tentang Ketentuan Pajak.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang No 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zubaidah, S. (2009). *Reading interest dan reading habit di masyarakat perguruan tinggi*. *Jurnal Iqra'*, 03 (01), 35.

**LAMPIRAN 1.** Wawancara dengan Penulis Buku 1.

Wawancara mendalam dengan Setyo Tri Wahyudi, SE., MEc., Ph.D. (penulis buku dan dosen di Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya)

Hari/Tanggal: Kamis, 19 April 2018

Tempat: Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Bapak kan sudah menerbitkan dua buku ya pak, nah buku itu diterbitkan lewat bantuan penerbit atau menerbitkan sendiri?

N: Jadi ada dua buku yang sudah saya terbitkan, nah untuk buku pertama semua yang menentukan adalah dari penerbit, sehingga kalau dia dikatakan tidak layak ya dari penerbit semua pembiayaan dari penerbit itu dari Jakarta, buku yang kedua sebetulnya juga sama, bedanya buku kedua ini karena penerbitnya dari dalam kampus sehingga seolah-olah yang mendanai juga penerbitnya juga melalui dana kampus, tapi sebenarnya dengan metode yang sama, artinya ya kalau dia tidak memenuhi standar penerbitan ya pasti tidak akan diterbitkan, itu artinya diterbitkan di dalam kampus atau di luar kampus sebetulnya sama, kita juga akan hanya mendapatkan royalti bedanya kalo dari dalam kampus karena ada kaitan dengan program ketahanan buku universitas, setiap dosen harus senang menulis, supaya senang menulis maka royalti di tahun pertama itu tidak dikasihkan, dia baru dikasihkan di tahun percetakan yang kedua, kalau eksemplar yang pertama udah habis baru kedua dihitung royalti. Jadi yang pertama itu nanti dikasih insentif bahasanya, tapi kalo yang nerbitin dari luar kampus, dari tahun pertama dari penerbitan pertama itu sudah dihitung royaltinya. Nah mana yang lebih enak? Ya semua ada sisi positif negatifnya lah ya.



P: Biasanya besaran royalti yang didapat berapa Pak?

N: Jadi besaran royalti kalau mengacu pada aturan yang umum berlaku ya misalkan dari penerbit, saya kira setiap penerbit punya aturan yang kurang lebih sama. Royalti itu nilainya biasanya antara 10%, 12,5% sampai maksimal 15% dari total penjualan buku. Kapan kita bisa dapat 10%, kapan dapat 12,5%, atau 15% misalnya, yaitu pertama penerbit melihat penulis ini adalah penulis yang baru atau penulis yang sudah sering menerbitkan buku. Kalau penulis itu penulis baru biasanya kita dapat royalti yang paling rendah kategorinya, misalkan 10%. Kalau dia sudah pernah menulis buku, dia sudah pernah dapat royalti, biasanya dia sudah mulai naik ya, ibaratnya *grade*-nya udah mulai naik nih orang ini, sehingga yang menentukan itu adalah penerbit dan dia melihat *trackrecord* penulisnya. Kalau dia penulis awal ya pasti dia mulai dari 10%. Sama di UB press juga sama, dari awal dimulai dari yang paling rendah dulu baru naik baru naik gitu.

P: Terus kan ini ada pemotongan pajaknya pak dari royalti..

N: Iya jadi ini yang menjadi permasalahan beberapa waktu lalu mengenai pajak penulis royalti itu ternyata sudah nilainya kecil dikenakan pajak lagi. Teman-teman penulis lain mengatakan kalau penulis ini sudah dieksploitasi waktunya, ketika dapat royalti kecil kena pajak lagi. Ibaratnya kita itu jadi tidak dapat apa-apa. Sehingga penulis itu sebenarnya bukan lagi mengejar materinya, tapi dia mengejar *prestige* bahwa tulisan itu bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga dengan alasan itu dengan kondisi apapun ya, dipajaki ataupun tidak dipajaki, royalti besar atau kecil, penulis akan tetap menulis, karena apa? karena mereka sebetulnya bukan mengejar sisi materinya, kalau materi, menulis buku ini nggak menguntungkan, kenapa? anda menerbitkan terus anda jual sendiri, anda dapat keuntungan dan anda ambil sendiri, itupun juga nggak menguntungkan. Kita habis waktu untuk menjual sendiri, kalau diserahkan ke penerbit, kita dapat royalti, royalti kecil, artinya apa? dalam kondisi apapun menulis buku, kalau kita ingin mencari keuntungan dari sisi materi, bahasa saya itu salah. Justru keuntungan yang kita peroleh adalah diluar materi, yang non materi. Misalkan nama jadi

terkenal, orang baca buku kita, itu jadi kebanggaan, kepuasan yang lebih mahal dari pada materi yang kita peroleh. Sehingga kenapa kita tetap senang menulis buku, meskipun ah cuma kasih royalti 10%, coba kamu hitunglah perbuku misalkan dijual Rp. 100.000, 10% nya itu cuma Rp. 10.000 bayangin coba setiap buku terjual cuma dapat Rp. 10.000. Kalau dia jual cuma 10 buku, dia cuma dapat Rp. 100.000, padahal membuat satu buku seperti ini, sebulan dua bulan bagi penulis awal, pemula, belum tentu selesai, setahun pun belum tentu jadi, tapi bagi penulis yang sudah sering menulis, sebulan jadi itu buku. Jadi bedanya di situ dan kita puas dengan wah buku kita jadi, dibaca oleh mahasiswa, di setiap kelas saya menggunakan buku saya sendiri, wah itu harganya jauh lebih mahal dari pada hanya sekedar materi.

N: Jadi menurut Bapak pengenaan pajak yang dipotong sebesar 15% itu terlalu besar atau adil tidak?

P: Sebetulnya kalau kita bicara menurut hati nurani, harusnya dengan royalti yang sudah kecil, harusnya tidak usah dipajaki lagi, yang dikenakan pajak seharusnya bukan penerima royaltinya, harusnya penerbit bukunya yang dia menjual buku kita, kenapa? Karena keuntungan sebetulnya paling besar adalah mereka. Taruhlah buku ini harganya Rp. 100.000, kita sudah dapat 10%, logikanya 90% nya masuk ke penerbit. Seharusnya penerbit itu pajak yang dikenakan ke penerbit plus biaya pajak royalti yang dibayarkan ke kita dan itu tidak memotong royalti kita. Nah mau dibuat 15% pajak royalti penulis, silahkan, akan tapi itu jangan dipotongkan dari royalti penulis yang terima, tapi dari royalti yang dibayarkan oleh penerbit. Beda kan? Jadi dari pemahaman itu sebetulnya kami penulis itu tidak mempermasalahkan, harus dapat royalti kecil, harus kena pajak, kami tidak mempermasalahkan itu, kenapa? karena itu kan aturan undang-undang. Apakah bisa kita mengatakan kita tidak mau membayar pajak, saya pikir kita tidak dalam konteks itu. Sehingga ini bukan dalam masalah kita menerima menolak kita tidak mau membayar, bukan, kalau itu sudah jadi aturan, kami juga harus patuh, tapi kalau kita diminta untuk masukannya seperti apa, yang kami inginkan ya kalau royalti itu sudah nilainya kecil, maka pajaknya itu ya jangan dikenakan ke

penulisnya, tapi ke penerbitnya. Sehingga bahasanya adalah penerbit itu nanti kena pajak untuk penjualannya, penerbit juga kena pajak untuk pembayaran royaltinya, tapi royaltinya tetap besarnya 15% atau 12% tadi, yang neto dikenakan ke penulisnya. Kalau seperti itu kita akan semakin nyaman.

P: Apakah pajak royalti mempengaruhi minat menulis Bapak?

N: Ya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya minat menulis itu tidak diawali dengan berapa royalti yang akan saya peroleh, berapa pajak yang nanti akan saya bayarkan, sehingga royalti saya akan menjadi sekian, saya pikir dari awal saya tidak menghitung seperti ini. Saya menulis ya saya menulis, walaupun nanti saya harus dapat insentif yang hanya cuma sebesar ini, royalti yang sebesar ini belum yang kena pajak, ya sudah tidak apa-apa. Menurut saya ya saya terima saja, artinya bahwa di awal menulis saya tidak pernah mengkalkulasi dengan berapa royalti yang saya peroleh, berapa pajak yang nanti harus saya bayarkan, saya tidak pernah mengkalkulasi itu dan saya tidak memilih-milih penerbit mana yang akan saya kirim naskah saya. Intinya semua penerbit kalau dia mau menerima naskah saya, dia siap mendistribusikan, saya akan mau menyerahkan draft saya. Jadi tidak penting menurut saya berapa royalti yang akan saya peroleh, saya tidak dalam mencari konteks untuk mencari materi.

P: Untuk potongan pajaknya, apakah Bapak langsung terima jadi jumlah penghasilan yang di dapat?

N: Biasanya pajak itu sudah dibayarkan juga, dipotong oleh penerbit. Sehingga penerbit ngasih saya 10% kurangi pajak royalti. Biasanya seperti itu, sehingga yang kami terima itu sudah nilai bersih. Namun dalam perpajakan, kami harus menyampaikan SPT pajak pribadi, ya saya harus sertakan royalti yang saya terima berapa. Tapi itu kan hanya menyampaikan saja karena itu nanti langsung dipotong oleh penerbitnya, sudah diambilkan di sana, sehingga tidak ada *double* pemotongan.

P: Apakah Bapak menerima bukti potong dari penerbit?

N: Harusnya saya dapat, seperti saya mengajar misalkan, saya mengajar di luar kampus saya misalnya, di STAN misalkan, saya juga dapat hrd, juga kena pajak, tapi saya bayar sendiri pajaknya oleh instansi yang mempekerjakan saya dan dari sana biasanya menjelang SPT pribadi yang harus disampaikan, mereka mengirimkan pemberitahuan sudah membayarkan pajak dari kampus, nanti saya tinggal dapat bukti potongnya saja. Nah harusnya buku pun juga sama, royalti harusnya saya juga dapatkan itu tapi selama ini kayaknya penerbit hanya memberikan informasi mengenai berapa royalti yang sudah dibayarkan kepada saya, bagaimana menghitungnya. Namun untuk SPT potongnya sampai hari ini saya belum dapat, tapi laporan berapa terjual, berapa royalti yang saya dapat itu saya peroleh. Saya nggak tahu nilai itu sudah dipotong pajak atau belum gitu ya.

P: Jadi kalau misalkan ada kelebihan pajak, tidak bisa diambil di akhir ya?

N: Nah ya itu, coba ini saya cek, saya pernah dapat laporan royalti dari penerbit Jakarta (sambil menunjukkan laporan pendapatan royalti). Ini laporan royalti periode Januari sampai Desember 2017, kan buku saya terbit di tahun 2016, dalam satu tahun dia melaporkan laporan royalti. Di dalam laporan royalti saya sudah dikenakan pajak 15%, tapi saya tidak dapat lampiran untuk bukti potongnya, tapi saya udah kena pajak. Kalau saya liat ini menurut anda kira-kira yang mebayarkan pajak saya atau perusahaan?

P: Dibayar dari royalti Bapak

N: Royalti saya kan? Artinya apa? saya itu harusnya menerima lebih dari Rp. 3.700.000 plus Rp. 458.000, tapi saya hanya menerima Rp. 3.700.000 dalam satu tahun, karena buku saya terjual sejumlah 189 dan 475, jadi ini hampir 700 eksemplar setahun dan saya baru dapat Rp. 3.700.000. ini dari 2000 buku yang dicetak, sehingga masih ada sekitar 1300, ya nanti berapa ya tinggal dikalikan aja, kira-kira berapa, sehingga saya masih dapat sekitar dua kali tiga kalinya ini lagi lah dari 2000 eksemplar yang dicetak. Nah ini baru laku sekian, sehingga kalau anda liat, kira-kira segini besar nggak? Ya kalau menurut saya kecil banget. Buku kayak gini cuma dihargai Rp. 3.000.000. Padahal keuntungannya lebih banyak

diambil oleh penerbit. Mereka sudah dapat draft, mereka sudah dapat kinerja, tapi bagi kami kan bukan itu lah, saya nggak hitung-hitungan materi, saya puas dengan buku saya sudah terbit, sudah dijual seluruh Indonesia. Ya anda bisa liat seperti ini lah cara hitungnya, saya juga sudah bayar 15%, saya hanya dapat 10% dan kena pajak 15%. Logikanya kan defisit kan itu ya, kalau hitung-hitungan matematika sederhana kan wah sudah dapat 10% harus dikenai 15% lebih mahal kan ya.

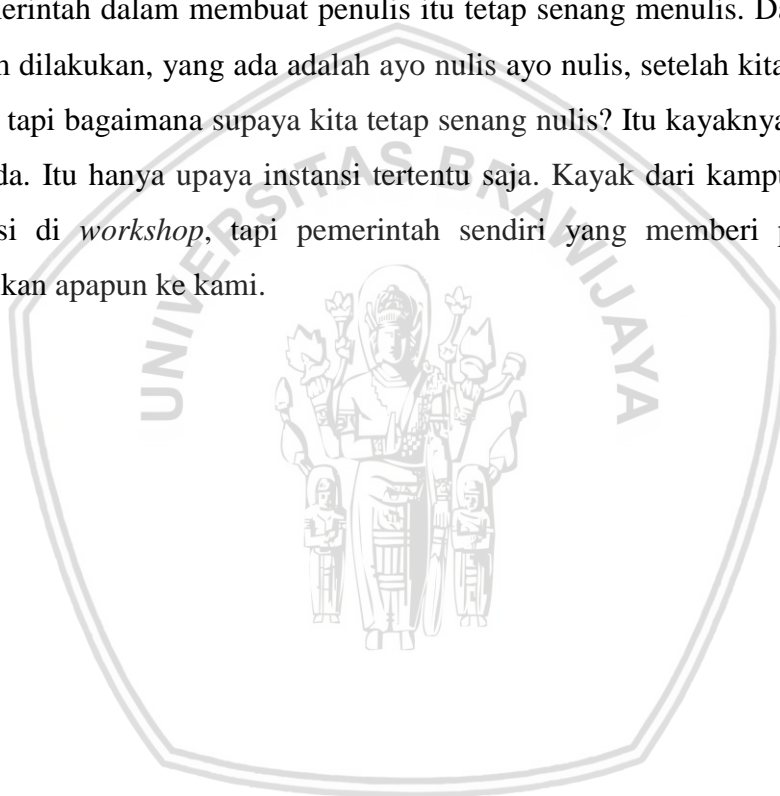
P: Nah lalu untuk perhitungan pajak, apakah Bapak mengetahui penerbit pakai pembukuan atau Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)?

N: Nah kalau yang seperti ini itu saya tidak tahu ya, karena penerbit itu tidak pernah menyampaikan informasi mengenai bagaimana metode mereka. Jadi mereka hanya menyampaikan laporan tahunan, nanti biasanya di bulan Februari mereka menyampaikan. Ini tahun 2018 kan? jadi tahun 2017 sudah dilaporkan, nanti tahun 2018 dilaporkan di tahun 2019. Jadi penjualan di tahun 2017 dilaporkan di awal tahun 2018. Penjualan di tahun 2018 dilaporkan di awal 2019. Kalau sudah habis, nanti buat kesepakatan lagi. Penulis punya hak untuk melanjutkan dicetak lagi di situ atau diambil ke penerbit lain silahkan. Haknya sudah habis untuk menerbitkan.

P: Lalu bagaimana solusi kedepannya mengenai pajak penulis?

N: Ya sebetulnya kalau melihat kondisi pajak penulis yang relatif besar sebesar 15%, itu menurut kami ya lebih baik pajak itu ditiadakan. Harusnya pajak itu dihitung ketika pendapatan untuk buku sudah mencapai sekian. Misalkan buku yang terjual minimal 10.000 eksemplar baru kena pajak. Dibawah 10.000 eksemplar penjualan buku, maka dia belum kena pajak. Bagaimana menghitung 10.000 itu? Ya terserah, bisa 10.000 per judul buku atau 10.000 semua buku yang pernah dia terbitin. Nah itu kan cuma masalah teknis, tapi ini jauh lebih menghargai penulis dari pada berapapun buku yang anda terbitin kena 15%. Jadi lebih bagusnya itu menghitung berapa minimum eksemplar yang sudah terjual baru itu diperhitungkan sebagai perhitungan pajak. Per 10.000 buku terjual

pajaknya sekian, per 15.000 buku terjual pajaknya sekian, harusnya modelnya begitu. Dan saya pikir kalau itu diterapkan sebagai kebijakan, saya pikir penulis akan lebih bergairah untuk menulis. Kalau perlu tidak hanya pajak yang dikenakan oleh pemerintah, pemerintah juga perlu insentif dong. Kalau anda bisa menerbitkan buku dalam satu tahun dua atau tiga buku, oke anda akan dikenai pajak 15%, tapi anda kami beri insentif lebih besar dari pajaknya misalkan. Nah itu kita tambah senang, sehingga jangan hanya narik saja, tapi apa sih kontribusi dari pemerintah dalam membuat penulis itu tetap senang menulis. Dan saya pikir itu belum dilakukan, yang ada adalah ayo nulis ayo nulis, setelah kita nulis malah dipajaki, tapi bagaimana supaya kita tetap senang nulis? Itu kayaknya yang masih belum ada. Itu hanya upaya instansi tertentu saja. Kayak dari kampus itu ngasih sosialisasi di *workshop*, tapi pemerintah sendiri yang memberi pajak belum memberikan apapun ke kami.





**LAMPIRAN 2.** Wawancara dengan Penulis Buku 2.

Wawancara secara tertulis dengan Mashdar Zainal (Penulis buku)

Hari/Tanggal: Senin, 21 Mei 2018

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Sejak kapan Bapak menjadi penulis dan berapa buku yang sudah anda terbitkan?

N: Saya menulis sejak tahun 2009, ada 8 buku solo dan puluhan antologi bersama.

P: Apakah Bapak menerbitkan buku melalui bantuan penerbit atau self publishing? Jika melalui bantuan penerbit maka sistem pembayarannya menggunakan sistem jual putus atau royalti?

N: Penerbit, ada yang jual putus, ada yang royalti, tapi rata-rata sistem royalti

P: Berapa besaran persen royalti yang didapat dan berapa persen potongan pajak yang dikenakan atas royalti?

N: Biasanya royalti 10%, dengan pajak sekitar 15% dari royalti yang saya dapat

P: Sejauh mana Bapak mengetahui ketentuan tentang pemungutan pajak atas royalti penulis?

N: Saya tak tahu banyak, sebab saya tidak terlalu mempermasalahkan soal pajak, bahkan beberapa penulis pemula (seperti saya), buku di-acc penerbit saja sudah senang.

P: Apakah Bapak mengetahui metode perhitungan pajak yang digunakan oleh penerbit? Jika Bapak mengetahui metode perhitungan pajak yang digunakan,

maka apakah menggunakan pembukuan atau Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)?

N: Tidak semua penerbit bersikap transparan terhadap royalti penulis, tapi kebanyakan penerbit menginfokan lewat surat soal perhitungan royalti tersebut. Dan sepertinya mereka menggunakan NPPN.

P: Apakah anda pernah melakukan restitusi atau permintaan kembali kelebihan pajak kepada kantor pajak?

N: Tidak pernah. Sebab saya tak begitu paham. Dan, selain itu saya kira itu cukup menyita waktu.

P: Bagaimana tanggapan anda mengenai pengenaan pajak atas royalti sebesar 15%? Apakah merasa keberatan?

N: Saya nyaris tak pernah merasa keberatan, tapi sebagai penulis tentu akan lebih senang apabila profesi penulis ini lebih dihargai. Sebab menulis bukanlah pekerjaan mudah. Menulis adalah mencipta karya. Bahkan sumbangsihnya penulis terhadap negara lumayan besar, dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

P: Apakah tingginya pengenaan tarif PPh Pasal 23 atas royalti mengakibatkan berkurangnya minat untuk menulis?

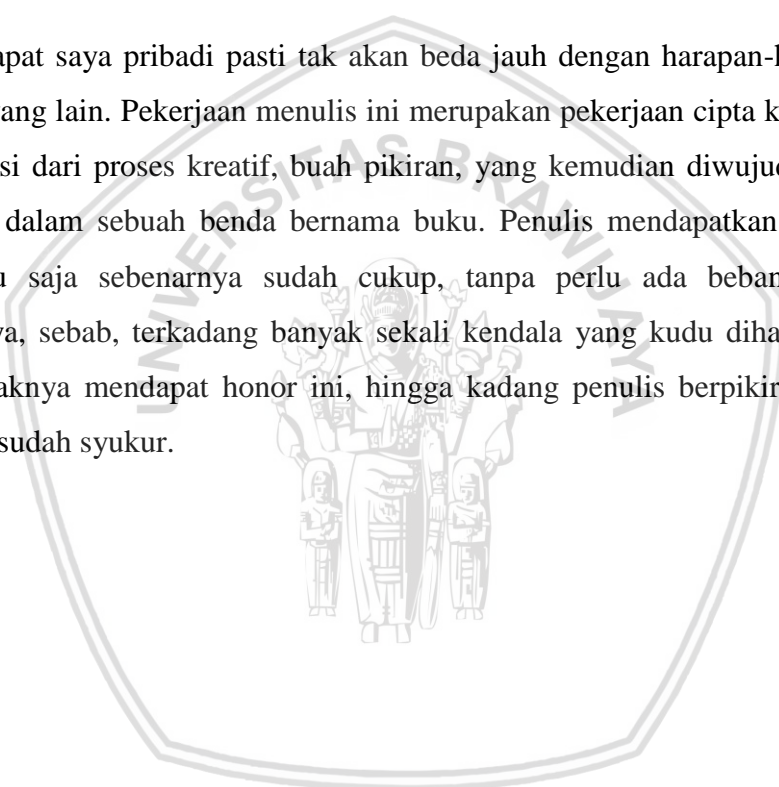
N: Bisa jadi. Tapi saya kira, hampir semua menulis tidak pernah menjadikan pekerjaan menulis sebagai pekerjaan utama untuk menyambung hidup. Menulis adalah pekerjaan 'sampingan' yang biasanya dilakukan karena hobi dan kesenangan semata. Honor tulisan bagi saya pribadi tak lebih dari bonus. Saya menyebutnya sebagai: hobi yang dibayar.

P: Pada akhir tahun 2017, DJP mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Pajak S-639/PJ.03/2017 tentang perlakuan pajak profesi penulis, bagaimana tanggapan Bapak terhadap surat edaran tersebut, apakah sudah dapat meringankan beban pajak penulis?

N: Sampai detik ini saya belum mencecap hasil secara kongrit dari Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut, sejauh ini saya mengira bahwa honor bagi penulis termasuk pajak dan tetek bengeknya masih tetap sama, tak ada bedanya. Entahlah, barangkali memang ketidaktahuan saya terkait detail peraturan tersebut, sehingga saya tak terlalu memikirkannya.

P: Menurut anda bagaimana sebaiknya solusi untuk kedepannya mengenai pajak atas royalti ?

N: Pendapat saya pribadi pasti tak akan beda jauh dengan harapan-harapan para penulis yang lain. Pekerjaan menulis ini merupakan pekerjaan cipta karya, sebuah kristalisasi dari proses kreatif, buah pikiran, yang kemudian diwujudkan dengan kongkrit dalam sebuah benda bernama buku. Penulis mendapatkan honor yang layak itu saja sebenarnya sudah cukup, tanpa perlu ada beban pajak dan seterusnya, sebab, terkadang banyak sekali kendala yang kudu dihadapi penulis terkait haknya mendapat honor ini, hingga kadang penulis berpikir, honor bisa cair saja sudah syukur.



**LAMPIRAN 3. Wawancara dengan Konsumen Buku 1.**

Wawancara mendalam dengan Indriati Nurul (Ibu Rumah Tangga sebagai konsumen buku )

Hari/Tanggal: Kamis, 1 Mei 2018

Tempat: Toko Buku

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Seberapa sering anda membeli buku dalam satu bulan?

N: Kira-kira antara satu sampai dua kali

P: Jenis buku apa yang Ibu beli?

N: Buku pelajaran untuk anak saya, kadang-kadang novel untuk anak saya atau saya sendiri

P: Nah kan harga buku semakin mahal, apakah harga buku mempengaruhi keputusan Ibu untuk membeli buku?

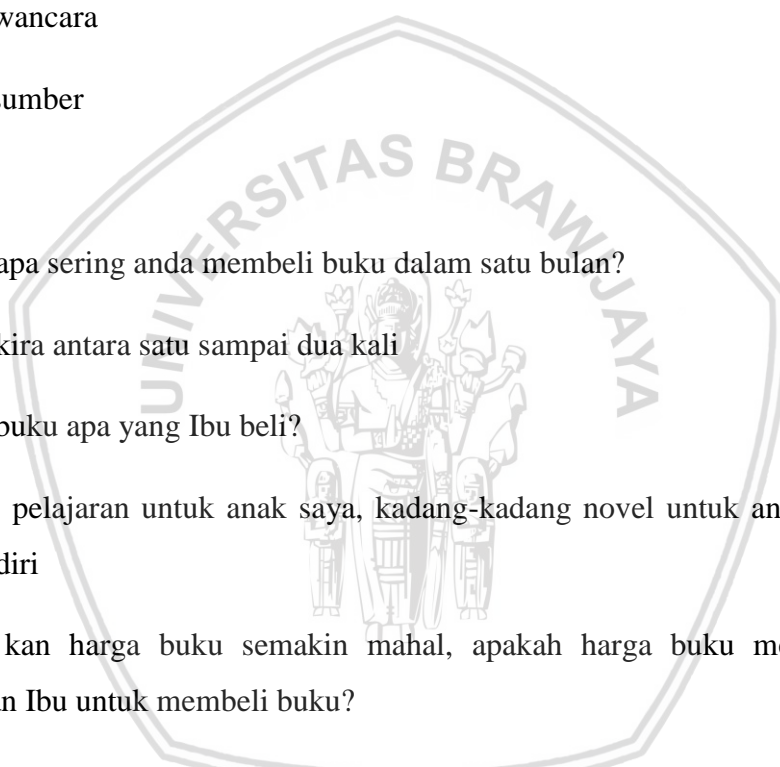
N: Iya, kan kalo harganya terlalu mahal gitu ya nggak jadi beli

P: Apakah harga buku yang semakin mahal juga mempengaruhi minat baca Ibu?

N: Sebenarnya kalo saya sedang sayu senang sama buku itu ya saya tetap beli, jadi saya akhirnya beli buku di toko-toko bajakan itu

P: Lalu untuk PPN buku, apa yang Ibu ketahui tentang PPN buku?

N: Yang pernah saya baca kayaknya 10% dari harga buku gitu ya?



P: Bagaimana tanggapan Ibu mengenai peraturan yang membebaskan PPN hanya untuk beberapa kategori buku seperti buku pelajaran umum, buku pelajaran agama, dan kitab suci?

N: Kalo menurut saya sebaiknya semua buku tidak perlu dikenakan pajak, supaya harga buku jadi murah, sehingga daya beli masyarakat terhadap buku semakin meningkat, akhirnya nanti minat baca dari masyarakat terutama anak-anak atau masyarakat Indonesia jadi meningkat, sehingga mereka jadi senang membaca

P: PPN buku kan dikenakan sebesar 10%, menurut Ibu sendiri apakah pengenaan PPN sudah jelas?

N: Selama ini saya kalau membeli buku tidak tahu tuh harga buku sebenarnya berapa terus pajaknya berapa atau di struk itu ada tidak ya? Saya tidak pernah memperhatikan.

P: Nah lalu bagaimana menurut Ibu untuk solusi kedepannya mengenai pengenaan PPN buku?

N: Menurut saya supaya harga buku tidak terlalu mahal, sebaiknya pajak 10% tidak perlu dikenakan pada buku, supaya minat membeli buku orang-orang Indonesia tuh semakin besar. Akhirnya minat bacanya pun semakin meningkat, akhirnya semakin banyak yang membaca.

**LAMPIRAN 4. Wawancara dengan Konsumen Buku 2.**

Wawancara mendalam dengan Putri Nabila(Mahasiswa sebagai konsumen buku)

Hari/Tanggal: Kamis, 1 Mei 2018

Tempat: Toko Buku

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Seberapa sering anda membeli buku dalam satu bulan?

N: Tergantung kebutuhan ya, kalau lagi awal masuk kuliah kan biasanya butuh buku pelajaran, itu bisa sampai tujuh kali. Tapi kalau akhir-akhir ini sudah jarang mungkin cuma satu kali buat beli novel.

P: Biasanya jenis buku apa yang anda beli?

N: Ya itu tergantung, biasanya buku pelajaran buat kuliah sama novel.

P: Apakah harga buku mempengaruhi keputusan anda untuk membeli buku?

N: Iya pasti, kadang lihat dulu kalau harganya mahal ya nggak jadi beli. Karena kan kebutuhan saya yang lebih penting juga banyak.

P: Apakah harga buku yang mahal mempengaruhi daya beli dan minat baca anda?

N: Iya, dulu waktu harga buku masih belum terlalu mahal seperti sekarang, saya sering beli buku jadinya sering baca buku juga. Tapi sekarang udah lumayan nggak sesering dulu lagi buat baca buku, soalnya harganya jadi mahal banget. Sekarang satu novel aja bisa sampai Rp 100.000 lebih padahal ya tipis. Padahal novel itu jadi hiburan buat saya.

P: Apa yang anda ketahui tentang PPN buku?



N: Ohh setuju saya kalau nggak salah yang 10% itu kan ya mbak?

P: Iya mbak, nah jadi kan PPN buku ini dikenakan sebesar 10% dari harga jual buku. Tapi ada beberapa buku yang dibebaskan dari pengenaan PPN, ada buku pelajaran umum, buku pelajaran agama, dan kitab suci. Menurut anda bagaimana tanggapan terhadap pengenaan pajak PPN pada buku?

N: Menurut saya kok kurang adil ya, kenapa tidak semua kategori buku saja yang dibebaskan dari pajak. Tentunya buku-buku yang isinya jelas ya. Menurut saya hampir semua buku juga mempunyai isi yang dapat bermanfaat. Dengan memperbanyak membaca buku, tidak hanya dari buku pelajaran saja ya, bisa dari novel, buku cerita, dapat menambah ilmu kita. Sehingga semakin banyak masyarakat yang membaca buku dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat.

P: Menurut anda apakah pengenaan PPN pada buku sudah jelas?

N: Menurut saya belum ya. Setiap beli buku tidak ada tulisan secara gamblang kalau buku dikenakan pajak sebesar 10%. Konsumen juga tidak tahu menahu mana saja buku yang dikenakan pajak, mana yang dibebaskan. Kan beda nggak seperti kalau kita pergi ke restoran gitu, di notanya pasti ada tulisan dikenakan pajak 10%.

P: Menurut anda bagaimana solusi untuk mengatasi PPN pada buku?

N: Ya dibebaskan saja lah semua buku dari PPN. Kalau memang Indonesia ingin meningkatkan minat baca, mutu pendidikan, ya harus ada upaya dari pemerintah untuk membuat buku menjadi murah dan tersebar di seluruh Indonesia, agar semua bisa membaca. Kalau sudah begini kan nanti minat baca masyarakat Indonesia meningkat dan masyarakat menjadi pintar.

Tapi jika nanti semua buku sudah dibebaskan, penerbit tidak boleh meningkatkan harga buku dengan semena-mena. Percuma dong kalau pajak sudah dibebaskan tapi harga tetap mahal, ya sama saja kan. Sekarang aja ya yang saya lihat buku-buku yang dibebaskan seperti apa tadi? Buku pelajaran sama kitab suci kok menurut saya harganya juga tetap mahal meskipun tidak ada pajak.

Sebenarnya pajak buku itu buat apa sih? Pajak cuma membuat buku menjadi mahal saja, jika masih dipajaki upaya pemerintah untuk menjadikan buku menjadi murah akan sulit tercapai. Saya berharap Pemerintah lebih peduli kepada buku, dengan memberikan insentif kepada penjualan buku dan membebaskan semua buku saja untuk mendorong minat baca masyarakat.

Makannya itu diperlukan juga pengawasan dan bantuan dari pemerintah untuk membuat semua buku jadi bebas pajak sehingga diharapkan nantinya buku bisa menjadi murah dan bermutu serta bisa tersebar di seluruh Indonesia. Ini kan juga untuk kemajuan bangsa ya.



**LAMPIRAN 5. Wawancara dengan Ahli Pajak.**

Wawancara mendalam dengan Hendi Subandi, SE.,MA(Dosen Pajak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)

Hari/Tanggal: Rabu, 9 Mei 2018

Tempat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Bagaimana tanggapan Bapak mengenai PPh Pasal 23 atas royalti penulis dan PPN buku?

N: PPN untuk buku kalo nggak salah sudah dibebaskan tapi hanya untuk beberapa, memang dilema tapi kalo substansi pajak itu kan setiap dia memberikan tambahan nilai ekonomis bagi orang itu maka akan dikenakan pajak, kedua pajak juga bisa dari penghasilan setiap dia mempunyai tambahan ekonomis bagi orang tersebut maka dia akan kena pajak juga. Dasarnya itu yang menjadikan apa saja objek yang dikenakan pajak. Buku ini memang idealnya adalah barang yang mungkin kena pajak tapi nilai yang mungkin harus direvisi lagi. Nah buku ini bisa bebas di PPN-nya, itu bisa dibebaskan tapi bisnis buku ini juga menggiurkan jadi rasa saya tidak adil kalau misalkan buku ini tidak dibebaskan dari PPN, karena ada pihak-pihak yang menambahkan manfaat dari itu. Itu pertama PPN ya.

Kalau saya gini yang perlu diperbaiki adalah persoalan buku ini adalah tidak ada pajak, kompleksitasnya banyak, pertama adalah bagaimana mekanisme industri ataupun bisnis buku ini sendiri. Kan tidak hanya ada penulis dan juga pembaca tapi ada penerbit, distributor dan toko buku. Secara idealis saya mengharapkan ya kalau bisa buku itu dibebaskan PPN-nya saja lah, karena dia tidak terkait dengan subjek, karena ini kan objek, objeknya buku. Kalau saya sih berharapnya

dibebaskan, tapi mekanisme ini bagaimana agar jangan sampai ketika buku sudah dibebaskan PPN-nya harga tetap masih mahal, kan percuma. Jadi malah ketika itu dikeruklah untungnya makin banyak, porsi komposisi keuntungannya malah makin melebar bagi penerbit dan juga mungkin bagi toko buku. Ini yang harus hati-hati untuk menyikapi itu. Kalau dalam konteks idealis saya sepakat buku itu dibebaskan.

Nah kalau untuk royalti saya pikir kejadian Tere Liye kemarin segala macam, itu adalah pertama pemahaman literasi para penulis atau yang lain terkait dengan pajak itu lemah memang, kedua adalah mekanisme ini sepertinya harus dilakukan penyederhanaan, walaupun kalau menurut saya masih sederhana, cuma bagi orang awam masih kompleks harus menghitung norma dan segala macam. Jadi kalau secara idealis saya sepakat memang, tapi hati-hati juga mekanisme ini jangan sampai nanti makin memperlebar keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait nanti.

P: Saya masuk ke PPN buku dulu ya Pak. Menurut bapak apakah pengenaan tarif PPN pada buku sebesar 10% terlalu tinggi?

N: PPN kan dasar tarifnya memang 10% walaupun ada kelonggaran misalkan tapi nanti kita lihat dari ilmu makro ekonomi kalau misalkan kondisi kita lagi inflasi yang luar biasa maka bisa tuh nanti diturunkan, kalau misalkan deflasi atau kondisi ekonomi tidak bagus maka bisa dinaikkan. Kalau buku 10% saya pikir ini yang harus disamakan dengan barang kena pajak lainnya, walaupun misalkan digunakan dengan nilai lain nah ini apa yang membuat istimewa dari buku itu, itu yang harus dipertegas di situ. Kalau misalkan oh kemahalan, soalnya 10% itu kan disamakan dengan barang semuanya.

Nah kalau saya daripada nanti bingung, gini misalkan ada nilai lain nih kayak emas batangan, ada lagi misalkan ada biaya promosi untuk PPN yang misalkan untuk pembelian cuma-cuma segala macam itu kan juga menggunakan nilai lain tapi tidak memasukkan marginnya kalau memang mau memasukkan sih silahkan, cuma kalau misalkan memang kemahalan kenapa enggak, pilihannya adalah membebaskan PPN dari buku itu, kalau misalkan terlalu tinggi atau tidak,

ketentuan PPN juga sudah segitu 10%. Nah itu yang saya pikir bukan di masalah terlalu tinggi atau tidaknya, nah maka buku ini masuk ke mana, apakah ke barang kena pajak atau barang yang dibebaskan pajak PPN-nya atau barang yang tidak dipungut PPN-nya. Nah itu yang pengkategorian itu, jadi semisalkan itu hanya ya sudah masukkan ke barang dibebaskan ya sudah berarti clear. Kalau nanti ngotak-ngatik tarifnya sama aja. Itu kalau menurut saya.

P: Kan ada di beberapa negara lain PPN buku dibebaskan atau pakai zero rating, kalau misalkan di Indonesia menerapkan seperti itu bagaimana Pak? Apakah dapat mempengaruhi perekonomian negara?

N: Kalau mempengaruhi perekonomian negara kayaknya terlalu jauh ya, karena buku pun kontribusi terhadap pertumbuhan sektornya juga rendah, tidak terhitung. Bahkan di Bekraf sendiri misalnya ya masih ekonomi kreatif tapi belum menjadi hal. Problemnya apa? ya berapa sih yang mau nulis buku gitu loh, jadi tidak banyak gitu kan, jadi sebenarnya yang paling penting dari buku itu adalah hmmm. Ini kalau ngomong tentang konteks pajak ya, saya sebenarnya pingin membicarakan lagi bahwa mekanisme dari pembuatan sampai penerbitan buku itu yang harus benar-bener dilihat lebih jauh, karena macamnya juga akan berbeda. Nah gini loh maksudnya saya contohkan gini ada yang memang naskah itu dikasih ke penerbit, nanti penulis dapat royalti dari situ. Kemudian kedua ada yang perlu kamu tahu ya namanya beli putus, penulis menyerahkan sudah saya beli putus deh, nanti diberi kompensansi penulisnya oleh penerbit misalkan 50 juta tapi haknya itu jadi milik penerbit. Nah mekanismenya seperti apa kalau itu? nah buku ini kalau sudah yang tadi kedua saya contohkan adalah sudah mau bisnis gitu. Tapi kalau yang pertama tadi adalah itu kaitan dengan ada banyak pihak yang terlibat royalti di situ segala macem. Nah itu yang saya pikir mekanisme dalam penerbitan buku juga harus dibenarkan. Nah konteks pajak, walaupun misalkan buku itu dibebaskan pajaknya saya pikir tidak ada masalah, karena kalau nggak salah itu janjinya Pak Jokowi juga untuk misalkan membebaskan PPN buku gitu kan, terutama buku ajar sudah kemarin, tapi untuk buku lainnya kalau kita memang ingin literasi kita meningkat ya saya pikir tidak usah pakai 0% atau

segala macem ya sudah bebaskan saja. Problemnya lagi adalah pembebasan kan tidak bisa serta merta diusulkan atau diterbitkan melalui KMK atau PMK atau mungkin Perdiirjen kan, tapi harus dibahas melalui Undang-Undang. Undang-undang ini juga masih panjang, UU KUP saja belum selesai apalagi nanti PPH, PPN itu masih lama. Jadi kalau bagi saya ya masalah pajak buku ini ya harus bersabar, cuma problemnya orang-orang itu gini loh, bukan melihat konteks buku ini penting dipajaknya atau tidak, tapi bagaimana para penulis buku ini. Saya melihatnya begini, bukan dari konteks bukunya yang bagaimana apakah sebagai barang kena pajak atau tidak tapi bagaimana penghasilan dari para penulis ini itu merasa dirugikan dengan perhitungan pajak ini, jadi kalau mengganggu perekonomian negara menurut saya tidak.

P: Lalu menurut Bapak bagaimana solusi kedepannya untuk mengatasi PPN buku?

N: Gini kalau PPN, kalau kita berkomitmen bareng bahwa buku adalah sebuah media untuk kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, itu harus ada kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif ketika pembahasan UU PPN. Saya berharap itu bisa menjadikan buku dibebaskan dari PPN. Nah buku impor tapi masih juga buku pelajaran yang masih dibebaskan kalau untuk buku lain masih belum. Kalau kita bersepakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mungkin nanti akan ada spesifikasi buku saja. Kalau memang ada beberapa pihak yang ini ngomong bisnis gitu, ini ngomongnya yang sudah ketika buku dibebaskan ngomongnya macem-macem lah, tapi kalau memang bersepakat ya sudah kalau memang ada beberapa yang tetap dikenakan ya apa gitu, buku yang model seperti apa, tapi yang lainnya semestinya memang harus dibebaskan, itu kalau saya.

Jadi penentunya adalah bagaimana legislatif dan eksekutif menyepakati bahwa buku itu bukan lagi barang kena pajak. Ini untuk PPN loh ya. Sebenarnya kalau mengacu pada UU Dasar sudah jelas gitu kan, apa makna kita di sini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau misalkan mohon maaf nih ada buku-buku tidak jelas dibebaskan nanti malah makin beredar. Nah kalau itu makin



beredar banyak. PPN kan fungsinya juga sebagai untuk memagari agar ada barang-barang yang tidak jelas itu juga muncul terlalu banyak. Kalau buku itu banyak hal-hal yang misalkan buku yang tidak produktif itu masih bebas di pasaran, itu jadi *problem*.

Bagi saya ya sudah langkah pertama adalah buku sebaiknya dibebaskan pajaknya. Kedua adalah mengatur dari bisnis buku itu sendiri. Ketiga dengan adanya itu seharusnya pemerintah sudah mengatur juga terkait peredaran buku-buku bajakan. Percuma dinol kan tapi kemudian dibebaskan banyaknya buku-buku bajakan. Nah yang berikutnya juga ada lagi, ini untuk fisik buku nih, bagaimana untuk e-book, seperti apa, misalnya di jual nih kena PPN apa nggak, itu juga harus menjadi hal penting bagi pemerintah untuk melihat posisi etbis seperti apa, karena ini sudah ngomong ekonomi digital ya. Itu yang menjadi hal penting juga. Kalau sudah seperti itu seharusnya dijelaskan pemahaman PPN buku yang tidak kena pajak itu, apakah seperti itu atau tidak. Saya sebenarnya sepakat jika buku itu sebagai barang tidak kena pajak, ya sudah segala turunannya juga dilihat.

P: Nah sekarang saya masuk ke royalti penulis ya Pak. Kemarin saya sudah wawancara dengan beberapa penulis dan mereka ingin pajaknya juga dibebaskan. Menurut Bapak bagaimana menanggapi hal tersebut?

N: Penulis pasti akan melihat bahwa mereka akan meningkatkan nilai mereka gitu. Ketika dibebaskan mereka akan mendapatkan *benefit* yang banyak dari situ kan dan itu bisa menggairahkan para penulis yang lain gitu. Tapi *problem* nya tidak begitu saja, problem penulis bukan hanya ketika menulis akan kena pajak, tidak kan?. Nah sekarang mahasiswa kita aja kan ada nggak minat menulis? Jarang kan, nulis status iya.

Saya pikir gini kalau persoalan royalti itu yang pertama adalah pemahaman literasi pajak para penulis masih banyak yang belum paham sehingga ketika ada kasus Tere Liye yang *booming*, itu menjadi langkah besar wah ini benar ini pajak harus dibebaskan atau salah pajaknya, pokonya semua jadi ikut rame-rame. Memang ada benarnya, tapi kalau menurut saya itu salah alamat. *Problem* terkait

dengan kepenulisan ini yang hanya dapat royalti 10% dan segala macam. Ini *problem* yang saya sampaikan di awal, mekanismenya tadi. Dia 10% yang dapat besar siapa? Penerbitnya misalnya terdiri dari berapa persen misalnya 30%, belum lagi toko buku. Proses bisnis ini lah yang sebenarnya menjadikan penulis terjepit. Mungkin *problem* di luar negeri misalnya kayak Harry Potter segala macem dia punya royalti misalnya nggak sampai 15%, tapi mekanismenya bagus dia dapat bonus segala macam, sehingga penulis terpacu. Di sini tidak hanya persoalan pajak saja, tapi persoalan dengan penerbit segala macam ini seperti terganggu. Ini kayak petani dengan misalkan para tuan tanah pokoknya kalau nggarap beli pupuknya di saya kemudian menggunakan uang dari saya jualnya ke saya tapi nilainya segini nih. Nah ini kan soal kartelisasi di dalam penerbit buku yang coba dibongkar oleh para penulis.

Nah terkait 15% segala macam ya silahkan kalau memang terlalu tinggi ya sudah, mungkin bisa diturunkan berapa, tapi kan pemahaman tidak hanya seperti itu. Royalti kan hanya dari penerbitan buku saja kan, mungkin kamu belum melihat bagaimana penghasilan lain yang didapatkan oleh para penulis. Kita ngomong yang sukses dulu ya, Dewi Lestari misalnya atau yang lainnya lah atau Andrea Hirata, justru mungkin yang banyak penghasilannya dari aktivitas di luar penulisan bukunya. Dia diundang tampil di mana, ngisi acara apa segala macam, itu yang banyak. Nah kalau saya lihat dari latar belakang Tere Liye segala macam kan diduga penghasilan para penulis kecil karena kena pajak, dicontohkan oleh dia kalau nggak salah gini kayak gini dibandingkan dengan yang lain. Kalau menurut saya pembandingnya tidak *apple to apple* (seimbang). Kedua adalah kita tidak dihadapkan bagaimana persoalan itu tidak hanya soal pajak dan persoalan pajak terlalu *simplifikasi* menurut saya. Problemnya adalah pemahaman literasi bahwa penghasilan para penulis tidak hanya dari buku, kedua adalah penghasilannya banyak dari yang lain-lain. Itu kan seperti penghasilan bruto. Lantas bagaimana misalkan untuk para penulis yang kecil yang hanya mengandalkan dari menulis. Saya sepakat bahwa nilai dari royalti buku itu tidak menjadi 15% tapi asumsikan saja misalnya disini royaltinya berapa persen ya

sudah disamakan saja dengan itu, misalkan umumnya 10% ya sudah disamakan saja, walaupun banyak juga yang 15%. Nah kemudian yang kedua adalah penulis juga harus belajar tentang pajak, karena kalau dihitung-hitung ya sama saja. Ini kan problemnya adalah mohon maaf “kemalasan” dari para wajib pajak untuk mengurus masalah restitusinya mereka. Kemalasan muncul karena apa? karena mungkin masih banyaknya prasyarat atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk melakukan restitusi itu. Tapi dengan kalau nggak salah KMK yang baru kalau nggak salah tahun 2018 itu sudah dimudahkan untuk mengurus restitusi. Jadinya menurut saya tidak lagi jadi penghalang, kalau dulu iya karena wajib diperiksa dulu segala macam. Kalau itu saya pikir jadi pointnya, jadi yang penting adalah bagaimana pemahamannya para penulis harus ditingkatkan. Sehingga keberatan mereka terhadap norma, norma sudah lumayan loh 50% terus nanti dikurangi PTKP baru nanti angkanya kelihatan berapa. Nah yang dari royalti kenapa bisa soalnya sifatnya tidak final, kalau final kalau nggak salah setahu saya mereka ingin seperti UMKM 1% langsung selesai gitu. Saya nggak tahu cara pandang mereka seperti apa, tapi kalau 1% itu nanti.. hmm mereka tidak menghitung keuntungan mereka berapa. 1% itu kan dari bruto kan, tapi mereka tidak tahu itu akan merugikan para penulis kecil dan menguntungkan penulis-penulis yang sudah besar. Nah ribut lagi karena mereka tahu tuh marginnya kecil banget kalau misalkan 1%, misalnya penulis dapat penghasilan 50juta, kemudian tidak tahu keuntungannya, nah kalau keuntungannya habis bagaimana. Makannya tidak *apple to apple* gitu. Nah itu tadi yang pertama adalah kalau mau diturunkan ya diturunkan saja tapi disesuaikan dibandingkan dengan berapa 10%. Kedua ya harus sadar juga bagaimana prosesnya, mungkin adalah porsi ini tidak mudah butuh proses karena lagi-lagi berkaitan dengan Undang-Undang. Undang-Undang masih lama mungkin tahun 2019 itu masih bahas selesai KUP, belum lagi PPh, jadi panjang. Saya pikir kalau mau diturunkan silahkan karena ya untuk menstimulus saja bahwa ketidakmauan para penulis itu bukan karena pajak sebenarnya, ya dari bangsa kita sendiri sebenarnya, dari masyarakat yang budaya menulisnya kurang.

P: Nah penulis ini kan dianggap sebagai pekerja bebas, kenapa penulis tidak dianggap sebagai profesi dan dimasukkan ke dalam PPh Pasal 21 kan menghitungnya lebih mudah?

N: Bukannya nanti dia tambah berat tuh kalau di situ?. Jadi gini anggap lah penghasilan penulisnya tuh sampai 1 miliar kemudian dihitung tuh misalnya pakai PTKP 54 juta, nanti dia menerima royalti juga, nanti tambah besar juga. Kalau misalnya menggunakan PPh pasal 21 bukannya malah merugikan tuh?. Mungkin gambaran mereka kayak dokter atau kayak bagian promosi atau kayak MLM gitu. Ada juga dia itu misalkan untuk normanya kan berjenajng. Kalau saya mending sudah dengan seperti ini toh mereka di bawah 54 juta tidak kena juga kan, dan dia juga dapat PTKP sama saja. Karena ketika profesi.. sama saja dokter kan juga profesi. Gini PPh Pasal 21 kan ada dua nih, saya takutnya pemahamannya keliru, ada yang karyawan ada yang non karyawan ada bukan karyawan. Nah kalau penulis ini masuk yang mana coba? Bukan karyawan kan, jadi mereka itu apa? pekerja bebas kan? macam-macam tuh ada beberapa artis, tenaga ahli segala macam. Kan sama saja dengan PPh 21. Jadi kenapa tidak masuk PPh 21, kan mereka sudah di dalam PPh Pasal 21, cuma kenapa nggak dihitung seperti karyawan? Karena mereka kan bukan karyawan. Kenapa bukan karyawan tidak tetap? Ya karena merek tidak memakai *fee* untuk honor, karena perolehan penghasilna mereka berbeda. Itu yang menjadikan mereka masuk ke norma tadi. Jadi menurut saya pengklasifikannya sudah *clear*. Makannya ada literasi yang pemahamannya yang mungkin belum sampai sana. Mungkin kerumitan dari pajak itu. Ya sudah saya pikir mereka PPN tidak kena imbasnya ya, karena itu urusan penerbit dan toko buku gitu kan. Jadi seharusnya kamu wawancara toko buku sebenarnya, karena itu kenanya di toko buku bukan di penulis bukan di penerbit juga. Ini menyimpang sebentar kalau misalnya PPN dibebaskan apa akan menjamin harga buku itu murah?. Sebenarnya yang dikenakan PPN itu wajib pajaknya. Nah pembacanya kalau misalnya bebas ya oke mau. Sehingga pngenaanya di konsumen akhirnya. Balik lagi tadi kenapa di PPh 21 ya saya pikir di PPh 21 kok. Mungkin nanti itu akan dikurangi untuk royaltinya. Saya sepakat

kok kalau misalnya rata-rata ya 10%, ya sudah dijadikan 10% ya nggak masalah, walaupun nanti ada yang 15%, itu sih.

P: Lalu yang terakhir Pak, bagaimana solusi kedepannya untuk PPh 21 atas royalti?

N: Itu tadi, solusi jangka pendek ya mohon bersabar karena ini masih lama jenjangnya. Itu tidak bisa dilakukan dengan KMK, PMK atau Perdirjen atau pun KUP karena ini sudah ngomong Undang-Undan. Karena pasalnya berkaitan dengan objek pajak ya, nah kedepannya ya sudah literasi bagi penulis penting untuk kesadaran literasi perpajakan juga menjadi hal yang perlu bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka. Bahwa pajak yang dikenakan pada mereka itu lah ya sudah aturannya. Tinggal bagaimana ketika ada perkembangan zaman, nah nanti itu ada di revisi Undang-Undang. Kedua adalah saya sepakat bahwa ada penurunan dari tarif royalti yang dulu 15% menjadi lebih spesifik sebesar 10%. Karena itu semangat yang sudah ada di Undang-Undang Dasar untuk buku, kalau untuk yang lainnnya seperti musik saya belum melihat. Tapi untuk ini saya sepakat karena amanat. Ketiga adalah untuk royalti ini adalah ya harusnya asosiasi tentang norma itu juga melihat tidak hanya dari sisi pajaknya tapi juga pembenahan mekanisme dari penerbitan sampai bisa dijual di toko buku. Itu yang jebakan-jebakan yang banyak di situ, prosentase 30%. Sebenarnya yang didapat penulis oleh buku hanya sedikit, sisanya yang banyak adalah toko buku dan penerbit. Jangan-jangan nanti yang dikenakan bukan para penulisnya lagi tapi para pebisnis itu. Mereka sudah mendiskon masih tetap dapat untung, padahal penulisnya berjibaku untuk itu. Kalau misalkan alasannya biaya promosi segala macam, itu masih bisa dibebankan tuh oleh toko buku, bisa dijadikan biaya sebagai pengurang pajak. Jadi harusnya lebih hati-hati dalam melihat apakah ini menjadikan pajak merugikan penulis? Saya pikir tidak, tapi mekanisme dalam penerbitan bukunya yang harus di lihat lagi, apa yang salah jangan-jangan ya mohon maaf seperti kartelisasi. Jadi ya itu mungkin, diturunkan saja lah tapi jangan dinol kan, tapi untuk buku ya silahkan.



**LAMPIRAN 6.** Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S – 639/PJ.03/2017

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENERAL PAJAK**

07 September 2017

**SURAT DIREKTUR JENERAL PAJAK**

**NOMOR S – 639/PJ.03/2017**

**TENTANG**

**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**  
**YANG MEMILIKI PEKERJAAN BEBAS SEBAGAI PENULIS**  
**DIREKTUR JENERAL PAJAK,**

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan terkait dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang berprofesi sebagai penulis novel/penulis cerita, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa anggapan sebagai berikut:

- a. bahwa profesi penulis novel/penulis cerita harus menanggung beban pajak lebih dari dua kali lipat dibanding profesi lainnya seperti dokter, arsitek, artis, penyanyi, dan profesi lainnya karena adanya perbedaan tafsir dari penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN);
- b. bahwa profesi penulis novel/penulis cerita yang memperoleh penghasilan royalti buku tidak boleh membebankan biaya. Namun, penulis novel/penulis cerita berpendapat bahwa mereka memerlukan biaya seperti biaya riset, biaya perjalanan, peralatan kerja, dan ketika novel/buku cerita telah jadi, penulisi novel/penulis cerita mengeluarkan biaya seperti biaya promosi, roadshow, dan biaya lain agar buku tersebut laku di pasar.

2. Ketentuan terkait:

- a. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP);
- b. Pasal 4 ayat (1), memori penjelasan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), memori penjelasan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), memori penjelasan Pasal 9 ayat (2),



Pasal 11A ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh);

c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;

d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN);

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa:

a. sesuai dengan ketentuan pada angka 2 huruf b, dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1) penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya,

2) penghasilan dari usaha dan kegiatan,

3) penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan

4) penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

b. pengenaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak didasarkan pada pengelompokan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

c. penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai penulis adalah sebagai berikut:

1) dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, penghasilan neto ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a) biaya atau pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung; dan

b) biaya atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m Undang-Undang PPh. Dalam hal biaya atau pengeluaran digunakan untuk memperoleh hak cipta di bidang kesusastraan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, biaya tersebut diamortisasi dengan metode dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat atau dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) Undang-Undang PPh.

2) dalam hal Wajib Pajak memiliki penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagai penulis dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), penghasilan neto dapat dihitung dengan menggunakan NPPN dengan syarat:

a) wajib melakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009;

b) wajib memberitahukan mengenai penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan;

c) besarnya NPPN bagi penulis berdasarkan PER-17/PJ/2015 (Kegiatan Pekerja Seni KLU: 90002) adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto, baik honorarium maupun royalti yang diterima dari penerbit.

d. penghasilan bruto dari pekerjaan bebas sebagai penulis sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dan angka 2) meliputi semua penghasilan yang terkait dengan profesi penulis, termasuk penghasilan royalti yang diterima dari penerbit dari hak cipta di bidang kesusastraan yang dimiliki oleh penulis.

e. pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain dan/atau pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri. Atas penghasilan dari hak cipta di bidang kesusastraan berupa royalti dipotong PPh Pasal 23 sebagai pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Peraturan Perpajakan II

ttd.

Yuniwansyah

NIP 196706221993111001

Tembusan :

Direktur Jenderal Pajak

**LAMPIRAN 7. Peraturan Menteri Keuangan No 122/PMK.011/2013.**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 122/PMK.011/2013**

**TENTANG**

**BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU  
PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU  
PENYERAHANNYA DIBEBAHKANDARI PENGENAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BUKU BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.**

#### Pasal 1

- (1) Atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- (2) Buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan keputakaan.
- (3) Kitab suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Kitab suci agama Islam meliputi kitab suci Alquran, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan Jus Amma;
  - b. Kitab suci agama Kristen Protestan meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
  - c. Kitab suci agama Katolik meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
  - d. Kitab suci agama Hindu meliputi kitab suci Weda, Smerti, dan Sruti, Upanisad, Itihasa, Purnama, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
  - e. Kitab suci agama Budha meliputi kitab suci Tripitaka termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian; dan
  - f. Kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.
- (4) Buku-buku pelajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan keputakaan di bidang agama.

## Pasal 2

- (1) Tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) antara lain:
- a. buku hiburan;
  - b. buku musik;
  - c. buku roman populer;
  - d. buku sulap;
  - e. buku iklan;



- f. buku promosi suatu usaha;
- g. buku katalog di luar keperluan pendidikan
- h. buku karikatur;
- i. buku horoskop;
- j. buku horor;
- k. buku komik;
- l. buku reproduksi lukisan.

- (2) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan sebagai buku-buku pelajaran umum dalam hal buku-buku tersebut telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.

### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), kitab suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan buku-buku pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama tersebut tidak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2013

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1063